

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG DI
KAMPUNG LUKU-LUKU DISTRIK WADANGKU
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S.IP Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

NANI MABEL

NIM 201710068

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM) YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KAMPUNG
LUKU-LUKU DISTRIK WADANGKU**

Disusun Oleh :

NAMA : NANI MABEL

NIM : 201710068

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

WAKTU PENULISAN : 2 BULAN

Telah diperiksa dan disetujui Pada Tanggal : 3 September 2021
dan siap untuk diseminarkan.

Pembimbing I

Pembimbing II

NUR AINI, S.Sos., M.AP
NIDN. 1422127401

HASRIANI M., S.Pd., M.Pd
NIDN. 1409128201

Mengetahui
Ketua Program Studi

SAHRAIL ROBO, S.Sos., M.IP
NIDN. 1425108601

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG DI
KAMPUNG LUKU-LUKU DISTRIK WADANGKU KABUPTENN
JAYAWIJAYA

Telah dipertahankan Skripsi ini di depan panitia Ujian Skripsi
Pada Hari Jumat, Tanggal 10 September 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekertaris,

NURAINI, S.Sos., M.AP

NIDN. 1422127401

Anggota,

HASRIANI M., S.Pd., M.Pd

NIDN. 1409128201

Anggota,

H. AGUS SUMARIADI, S.Pt., M.Si

NIDN. 1212116701

DEFRAN SISKA, S.E., MM

NIDN. 1417098702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si

NIDN. 1207086701

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Konseptual Penelitian.....	40
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	41
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	42
D. Instrumen Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ilustrasi Siklus Keuangan Kampung	30
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Luku-luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dana Desa Yang Diterima Priode 2017-2019	5
Tabel 1.2. Program Kampung.....	6
Sumber : Kantor Kampung Luku-Luku, 2021	7
Table 2.1. Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1. Tabel Interpretasi Skor	44
Tabel 4.1 Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Keadaan Responden Menurut Pendidikan	49
Tabel 4.3 Keadaan Responden Menurut Pekerjaan	50
Tabel 4.4 Keadaan Responden Menurut Agama.....	50
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Terkait Dengan Informasi Tentang Pembangunan Perumahan Kampung	51
Tabel 4.6.52 Tanggapan Responden Terkait Keikut Sertaan Dalam Pengalokasian Dana Kampung.....	52
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Terkait Dengan Mengetahui Informasi Tentang Pengelolaan Dana Kampung.....	52
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Tentang Mendapatkan Pencerahan Tentang Pengolahan Dana Kampung.....	53
Tabel 4.9. Tanggapan Responden Terkait Berapa Banyak Dana Yang Digunakan Untuk Pembangunan Jalan Dan Jembatan	54
Tabel 4.10. Tanggapan Responden Terkait Dilibatkan Dalam Muskam Kampung.....	54
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Tentang Pengambilan Keputusan Tentang Pembangunan Kampung	55
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Yang Ada Di Kampung Luku-luku Berjalan Sesuai Dengan Kesepakatan Yang Sudah Ada.....	56

Tabel 4.13	Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Program Kampung Seleras Dengan Kesepakatan Bersama	56
Tabel 4.14	Tanggapan responden tentang keikutsertaan dalam pengelolaan dana kampung tentang pembangunan perumahan	57
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Tentang Pengalokasian Dana Di Masing-Masing Program Kampung Yang Ada	57
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Tentang Kerjasama Antara Masyarakat Kampung Dengan Aparat Kampung Dalam Pembangunan Kampung.....	58
Tabel 4.17	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Untuk Membuat Laporan Penggunaan Dana Kampung Setiap Tahun	59
Tabel 4.18	Tanggapan Responden Tentang Aparat Kampung Luku-Luku Mampu Untuk Menyampaikan Penggunaan Dana Kampung Di Setiap Program Masing-Masing.....	59
Tabel 4.19	Tanggapan Responden Tentang Aparat Kampung Luku-Luku Mampu Mendata Masyarakat Yang Ada Di Kampung Luku-Luku	60
Tabel 4.20	Tanggapan Responden Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Ada Di Kampung Luku-luku.....	61
Tabel 4.21	Tanggapan Responden Terkait Pengalokasian Dana Kampung Sesuai Dengan Harapan Masyarakat.....	61
Tabel 4.22	Tanggapan Responden Terkait Dengan Aparat Kampung Luku-Luku Membuat Arsip Tentang Keuangan Setiap Tahun	62
Tabel 4.23	Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Sarana Prasarana Di Kampung Luku-luku	62
Tabel 4.24	Tanggapan Responden Terkait Pengelolaan Sarana Prasarana Yang Ada Di Kampung Luku-Luku	63
Tabel 4.25	Tanggapan Responden Terkait Menjaga Sarana Prasarana Yang Ada Di Kampung Luku-Luku	63

Tabel 4.26 Tanggapan Responden Terkait Dengan Kesepakatan Untuk Pembangunan Pasar Tradisional Di Kampung Luku-luku	64
Tabel 4.27 Tanggapan Responden Terkait Melibatkan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Untuk Pembangunan Pasar Tradisional.....	65
Tabel 4.28 Tanggapan Responden Terkait Pembangunan Pasar Tradisional Berjalan Dengan Baik.	65
Tabel 4.29 Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Dana Kampung Sesuai Dengan Kebutuhan Program Masing-masing	66
Tabel 4.30 Tanggapan Responden Terkait Masyarakat Percaya Kepada Aparat Kampung Tentang Pengelolaan Dana Di Setiap Program Masing-Masing.....	67
Tabel 4.31 Tanggapan Responden Terkait Aparat Kampung Dalam Membuat Laporan Sesuai Dengan Penggunaan Dana Di setiap Program Masing-Masing.....	67
Tabel 4.32 Tanggapan Responden Tentang Menerima Masukan Dari Masyarakat Tentang Pembangunan Kampung	68
Tabel 4.33 Tanggapan Responden Terkait Aparat Kampung Dengan Masyarakat Saling Menerima Pendapat Demi Kemajuan Kampung.....	68
Tabel 4.34 Tanggapan Responden Terkait Dalam Pembangunan Kampung Ada Perbedaan Pendapat	69
Tabel 1.35 Tanggapan Responden Tentang Rapat Penyalgunaan RAPKB	70
Tabel 4.36 Tanggapan Responden Terkait Menggunakan Prosedur Belanja Barang Dalam Pengelolaan Dana Kampung	70
Tabel 4.37 Tanggapan Responden Terkait Dalam Pembangunan Pasar Tradisional Menyalgunakan SOP.....	71
Tabel 4.38 Tanggapan Responden Tentang Upaya Dalam Perbedaan Pendapat Antara Masyarakat dan Aparat Kampung.....	71

Tabel 4.39 Tanggapan Responden Terkait Dengan Ada Upaya Dalam Perbedaan Pendapat Antara Masyarakat Dan Aparat Kampung..	72
Tabel 4.40 Tanggapan Responden Terkait Dengan Ada Upaya Dalam Pembangunan Program Masing-Masing Agar Berjalan Dengan Baik.....	72
Tabel 4.41 Perolehan skor untuk indikator komunikasi.....	74
Table 4.42 Perolehan skor untuk indikator sumber daya	76
Tebel 4.43 Perolehan skor untuk indikator disposisi	80
Tabel 4.44 Perolehan skor untuk indikator struktur birokrasi	83
Tabel 4.45 Rekapitulasi perolehan skor rata-rata tentang implementasi kebijakan program dana kampung di kampung Luku-luku Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya	84

ABSTRAKSI

NANI MABEL (NIM. 201710068) "*Implementasi Kebijakan Program Kampung Di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya*" (Ibu Nuraini dan Ibu Hasriani)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kampung Di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya penelitian ini merupakan variable mandiri dengan indikatornya implementasi vertikal dan implementasi horizontal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dalam penarikan sampel penulis menggunakan sampel jenu sehingga diperoleh sampel adalah 73 KK analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor maksimum dan skor minimum.

Hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Program Kampung, Di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya, sangat baik.

Kata kerja : *Implementasi, Kebijakan, Program, kampung.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 yang mengatur tentang otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Chasanah, Khuswatun ; Rosyadi, Slamet ; Kurniasih, Denok ;, 2017).

Dalam rangka peran serta kerja pemerintah daerah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 mendefinisikan pengertian yakni Desa adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*) pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peran pemerintah Kampung memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Kampung pada sarana prasarana.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Kampung memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Kampung.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 ditegaskan pemerintahan Kampung diselenggarakan oleh pemerintah Kampung. Pasal 25 “Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Kampung atau yang disebut dengan nama lain”. Selanjutnya pasal 48 “Perangkat kampung terdiri atas sekretariat kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis”. Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan pemerintah kampung, melaksanakan pembangunan kampung. Pemerintah kampung merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah di kampung mempunyai tanggung jawab yang besar, baik buruknya penyelenggaraan pemerintah akan sangat tergantung pada kinerja dari aparat kampung sebagai unsur penyelenggara.

Aparat kampung merupakan bagian dari aparat pemerintah yang merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan pelaksana tugas pemerintah. Aparat kampung merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Aparat kampung merupakan mempunyai peranan sebagai unsur aparatur pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kampung, aparat kampung dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat kampung sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah kampung sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah kampung perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat kampung dan lingkungan sekitarnya. perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kampung disebabkan adanya gerakan pembangunan kampung perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan kampungnya. Sehingga kampung dan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat kampung dan pengembangan wilayah kampung adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) untuk pembangunan wilayah kampung yakni dalam bentuk alokasi dana kampung.

Pengelolaan dana kampung di Kampung Luku-Luku berdasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah yang semakin membutuhkan pendanaan untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. pemerintah Kampung Luku-Luku berharap dengan adanya alokasi dana ke kampung, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung

terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di kampungnya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat kepada penulis bahwa pengelolaan dana kampung di Kampung Luku-Luku Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya masih terdapat banyak permasalahan, misalnya pemahaman perencanaan yang masih kurang karena pengetahuan dan keterampilan aparatur sebagai pelaksana dalam membuat perencanaan pembangunan kampung. Begitupun dengan membuat dokumen administrasi kegiatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.

Pada tahapan perencanaan penggunaan anggaran lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala kampung sehingga pada masa musyawarah rencana pembangunan took masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, sehingga apa yang diinginkan masyarakat tidak terakomodir.

Kampung Luku-Luku merupakan daerah yang tergolong tertinggal di Distrik Wadangku, karena lokasinya jauh dari pusat kota atau pembangunan dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, dan tercatat sebelum adanya dana kampung, Kampung Luku-Luku masuk kategori desa tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan alam tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Dengan pernyataan tersebut, maka dalam melakukan pembangunan diperlukan bantuan dana yang akan mengembangkan dan kemudian mensejahterakan masyarakat desanya, lalu kemudian dengan adanya dana kampung mampu membuat Kampung Luku-Luku menjadi desa yang berkembang atau yang disebut Desa PraSembada, yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan alam tetapi belum mengelolanya secara optimal maka untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya bantuan dari dana desa, kemudian bertahap dengan program dan strategi dalam memberdayakan masyarakatnya, maka Pemerintah Kampung Luku-Luku merasa optimis untuk menjadikan Kampung Luku-Luku menjadi desa yang mandiri. Berdasarkan wawancara dengan aparat Kampung Luku-Luku, yaitu Sekertaris Kampung Luku-Luku mengaku optimis untuk bisa menjadikan Kampung Luku-Luku menjadi desa mandiri. Dengan meningkatkan program pemberdayaan yang akan menciptakan lowongan pekerjaan dan pelatihan-pelatihan yang kemudian nantinya akan bersama-sama membangun desa, juga memperbaiki sarana transportasi seperti memperbaiki akses jalan agar supaya mempermudah untuk masyarakat Kampung Luku-Luku melakukan kegiatan, ataupun untuk mempermudah wisatawan agar dengan mudah bisa mengunjungi wisata yang ada di Kampung Luku-Luku, dan pembangunan lainnya.

Besaran dana kampung yang diterima oleh Kampung Luku-Luku adalah jumlah kampung dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Anggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap sementara yang penulis peroleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kampung Luku-Luku yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Dana Desa Yang Diterima Priode 2017-2019

No	TAHUN	JUMLAH
1	2017	Rp. 276,897,600;
2	2018	Rp. 276,897,600;
3	2019	Rp. 780,896,000

Sumber : Kantor Kampung Luku-Luku, 2021

Karena kurang adanya mis komunikasi antara aparat kampung dengan masyarakat maka terjadi pengalihan dana kampung ke pembangunan pasar tradisional di Kampung Luku-Luku.

Dari data tersebut, alokasi dana kampung telah dilakukan sejak tahun 2017 dan 2018 dana kampung masih difokuskan untuk pembangunan desa, yaitu dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa, seperti infrastruktur jalan, pengaspalan jalan dan pembuatan jalan pertanian, dan irigasi. Sedangkan pada tahun 2019 sampai sekarang alokasi dana desa selain untuk infrastruktur atau pembangunan desa, seperti pembangunan jalan, irigasi, sarana pendidikan dan pembangunan lainnya, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan, dan wisata.

Adapun komunikasi antara aparat kampung dan masyarakat terkait pengalokasian dana kampung untuk pembangunan pasar tradisional di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya awalnya tahun anggaran 2018 telah dialokasikan program dana kampung untuk pembangunan ternak babi namun dialihkan pada pembangunan pasar tradisional karena kurang ada mis komunikasi antara aparat kampung dan masyarakat maka terjadi pengalihan dana ke pembangunan pasar tradisional.

Tabel 1.2.
Program Kampung

No	Program Kampung	Tahun	Keterangan
1	Pembangunan Perumahan	2017	Pembangunan dapat berjalan atau dibangun dari dana kampung dengan kesepakatan bahwa setiap KK yang dibangun rumahnya menanggung bahan lokal seperti kayu, batu, pasir,

			sedangkan bahan toko seperti semen, seng, tripleks, paku, kaca dll disiapkan dari dana kampung oleh aparat kampung termasuk bayar tukang.
2	Peternakan Babi dan Pembangunan Kandang Ternak Babi	2018	Pembangunan kandang ternak dan pembelian ternak Babi, tidak dilaksanakan karena dana kampungnya dialokasikan untuk pembangunan pasar tradisional di Kampung Luku-Luku Distrik Wadangku.
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	2019	Pembangunan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan dana kampung yang sudah dianggarkan karena pembangunan jalan dan jembatan diprioritaskan sebagai satu sarana untuk masyarakat dan anak-anak serta guru-guru di Kampung Luku-Luku Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya.

Sumber : Kantor Kampung Luku-Luku, 2021

Dari table 1.2. tersebut diatas diketahui bahwa terdapat program pada Tahun 2017, 2018, 2019 yang berjalan maupun yang tidak berjalan ditahun yang sama.

Aparat pelaksana kurang memahami dengan baik apa yang dibutuhkan masyarakat dalam penggunaan dana kampung, kekurangan kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana kampung, dan kurang mempunyai kemampuan mengembangkan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan di kampung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang pengelolaan Dana Kampung Luku-Luku dengan berjudul “Implementasi Program Pembangunan Kampung Di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Program Dana Kampung di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya. Adapun indikator-indikator penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah yang dikemukakan adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Dana Kampung di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini akan diperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan program dana Kampung di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini akan diperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan Program Dana Kampung di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.
- b. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat terhadap para penyelenggara pemerintahan daerah, khususnya aparatur pemerintah Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan pengelolaan dana kampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

(1) Pengertian Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Daniel A. Musmania dan Paul A, Sabatrie 1979, Menjelaskan mengenai makna dari Implementasi serta mengatakan bahwa memahami sesuatu kenyataan dan terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan perhatian dari Implementasi sebuah kebijakan (Mustanir, Ahmad ; , Darmiah;, 2016)

Menurut Florensi, Helen;, (2014) implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : Untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan

Dapat Nurfaizal, Muhammad Dwi;, (2019) Menyatakan implementasi adalah *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan yang berarti pula menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan.

Sementara menurut Gordon dalam Posolong dalam Malyadi (2015:24) Implementasi berkenan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dengan demikian implementasi

adalah proses untuk melaksanakan suatu rencana kebijakan yang berupa peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45) “*Those Activities directed toward putting a program onto effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasil), sedangkan menurut Horn dan Mater “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (Tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Grindle (Mulyadi, 2015:47) “Menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Meter dan Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

Menurut Mazmania dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan

eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson Mustanir, Ahmad,; Darmiah,; (2016) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecakan suatu masalah. Kebijakan public, policy, menjadi dua : substantif dan procedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Nurfaisal,; ddk (2019) bahwa “*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kebijakan sebagai suatu konsep filosofi merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
- b) Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai rangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
- c) Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya
- d) Sebagai suatu kerangka kerja kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Thoha (2014:106) dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain : (1) *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktikan kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat. (2) *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi akan mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut (Chasanah, Khuswatun ; Rosyadi, Slamet ; Kurniasih, Denok ;, 2017).

Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2014:125), “Sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and praktives*)”. Selanjutnya syafiie (Tahir, 2014:20), kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan. merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

c. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:196) mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.

Bressman dan Wildansky dalam Agustino (2008: 198) menyatakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Pada tahap formulasi ditetapkan formulasi ditetapkan strategi dan tujuan tujuan kebijakan sedangkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195) menjelaskan bahwa : Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Mazmania dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Grindle (Waluyo, 2007:49) menyatakan “Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Mulyadi (2015:26) menyatakan, “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

Kemudian menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahnya yang sah dari suatu kebijakan meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau *outcome* bagi masyarakat”. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastier (Waluyo, 2007:50) bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi :

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Pengaru langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Mazmania dan Sebastier dalam Tahir (2014:56) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan pejabat pelaksanaan dilapangan dan aktor individu selaku kelompok target”.

(2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142) menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan public pada level yang dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksananya. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkannya.

d. Sikap/Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksanaan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi Antara Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

Menurut Grindle dan Agustino (2008: 192) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu :

(1) Isi kebijakan (*content of policy*)

Variabel isi kebijakan mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, apakah letak dari sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya manusia.

(2) Lingkungan implementasi (*Conteks of policy*)

Variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsifitas sasaran.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastir dalam Agustino (2008:196) terdapat 3 kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu :

- a. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*) kelompok variabel karakteristik masalah mencakup :
 1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 4. Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.
- b. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) kelompok variabel karakteristik kebijakan/undang-undang mencakup :
 - a)Kejelasan isi kebijakan;
 - b)Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c)Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;
 - d)Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar

berbagai institusi pelaksana; e)Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; f)Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan g)Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

- c. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Variabel lingkungan kebijakan mencakup a)kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b)Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; c)Sikap dari kelompok pemilih; dan d)Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

George C. Edward III Sebagaimana dideskripsikan oleh Subarsono (2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Menurut pandangan Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2008:175-177), proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting yaitu a)Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan; b)Faktor kedua adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagai mana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana

kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering kali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan; c) Faktor ke tiga adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bilah perintah tersebut bertantangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

b) Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan maka implementasi tidak berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementator dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan retape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadi aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Edwards, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2008:181), bahwa sumber-sumber penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur birokrasi menurut Edwards, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2008:203) terdapat dua karakteristik utama, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

Selanjutnya menurut Edwards III dalam Winarno (2014:106) ada dua karakteristik utama didalam birokrasi yakni :

a. *Standar Operational Procedure* (SOP)

SOP merupakan sebuah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk sebuah keseragaman bekerja dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas (Winarno, 2014:206). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasanya digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksanaan dapat juga memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam melakukan penerapan peraturan-

peraturan. Menurut Agustino (2014:153) SOP adalah suatu kegiatan yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan / administrator / birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatan pada setiap hari sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).

b. *Fragmentasi*

c. Edward III dalam Winarno (2014:09) menjelaskan bahwa *Fragmentasi*

Merupakan bagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi. Umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan dalam keberhasilan program atau kebijakan. *Fragmentasi* dapat mengakibatkan macam pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

(3) Model Implementasi Kebijakan

Nugroho (2014:665-678) bahwa ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model klasik, yakni model yang memperkenalkan oleh Duet Donal Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variable :

- 1). Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi.
- 2) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.

- 3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- 4) Kecenderungan (*Disposition*) dari pelaksana/implementor.

b. Model Mazmania dan Sebatier

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmaniel dan Paul A. Sebatier mengemukakan bahwa implementasi upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazanian dan Sebatier disebut sebagai model kerangka analisis implementasi (*A Framework Ford Implementation analysis*). Model Mazmanian Sebatier mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu muda tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga variabel independen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam membentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada refisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Hoodwood dan Gun Model

Ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya atau sumber-aktor. Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan tidak didasari hubungan kausal yang andal.

Syarat kelima adalah seberapa banyak kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “Sebab garis datar akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektifitas implementasi kebijakan. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi justru implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif, apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditetapkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektifitas implementasi kebijakan. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi

adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi. Syarat kesepulu adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan-tanpa ada imbas bagi target kebijakan.

d. Model Goggin Bowman, Lester

Malcom Goggin, Ann Bowman, James Lester mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, interfening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

e. Model Grindle

Model ke lima adalah model Marilee S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup :

- 1). Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- 2). Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3). Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4). Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5). (Siapa) pelaksana program
- 6). Sumber daya yang digerakan.

Model grindle terletak pada pemahaman yang kompresif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerimaan implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi

diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

f. Model Elmore dkk

Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern dan David O' Porter. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan public yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, public yang menjadi target atau pilihannya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksanaannya. Kebijakan model ini biasanya di perakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

g. Model Edward

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *comunitation, resources, disposition or attitudes*, dan *bureaucratis structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. *Recources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari pada implementor untuk cari *out* kebijakan tersebut. Struktur birokrasi

berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

h. Model Nakamura & Smalwood

Model kebijakan sebagai “*enviroments influencing implementation*”, yang terdiri dari tiga elemen dengan masing-masing terdapat aktor.

i. Model Jaringan

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah *comlex of intraction processes* diantara sejumlah besar aktor yang berada didalam suatu yang jaringan (*Net Work*) aktor-aktor yang independen. Pada model ini, semua aktor didalam jaringan relatif otonom artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator. Pada pendekatan ini, kuwalisi dan/ atau kesepakatan diantara aktor yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu implementasi kebijakan dan keberhasilannya.

(4) Dana Kampung

Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan Dana Kampung tersebut melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Kampung. Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Kampung yang bersumber dari APBN disebutkan : pasal 5

- 1). Dana Kampung dialokasikan oleh pemerintah untuk Kampung.
- 2). Pengalokasian Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kampung dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

(5) Pengelolaan Keuangan Dana Kampung/Kampung

a. Pengertian pengelolaan dibawa menurut Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut : pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebentara itu menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelolah” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut nugroho (2003:119) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jau diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya.

b. Keuangan Kampung

Menurut peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014: Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Kampung dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dipergunakan

untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian keuangan Kampung yang dipetik dari permendagri No 113 Tahun 2014 : semua hak dan kewajiban Kampung yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.

c. Pengelolaan Keuangan Kampung

Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran terhitung mulai Tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam pengelolaan keuangan Kampung, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dan mewakili pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan adalah kepala Kampung. Kepala Kampung bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kampung, menetapkan PTKPD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kampung), menetapkan petugas pemungutan pemerintah Kampung, pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Kampung, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Kampung (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Kampung (PTKPD) terdiri dari sekretaris Kampung, kepala seksi (kasih), dan bendahara.

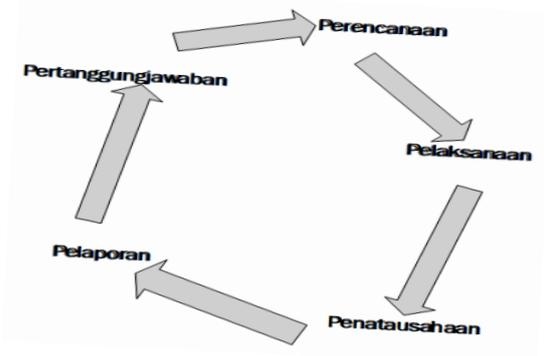
Tugas dari sekretaris Kampung adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Kampung; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung; menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan APB Kampung; dan melakukan verifikasi terhadap rencana belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (lembaga kemasyarakatan Kampung) ditetapkan dalam APB Kampung, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kepala Kampung, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Kampung.

Pengelolaan keuangan Kampung merupakan rangkaian kegiatan Kampung yang berlangsung dengan mengikuti siklus.



Gambar 2.1. Ilustrasi Siklus Keuangan Kampung

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah Kampung menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai sakan datang.

Menurut Manila I. GK. (1996:25) mengatakan bahwa perencanaan merupakan aktifitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan pada masa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya.

Dokumen perencanaan keuangan Kampung meliputi RPJM Kampung dan RKP dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawara perencanaan pembangunan Kampung yang melibatkan badan permusyawaratan Kampung (BPD) dan unsur masyarakat Kampung. RPJM Kampung memuat penjabaran visi dan misi kepala Kampung terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan rah kebijakan perencanaan pembangunan Kampung.

RPJM Kampung mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kampung dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Kampung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala Kampung. RKP Kampung merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu satu tahun. RKP Kampung memuat rencana penyelenggaraan pemerintah Kampung, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakatan Kampung. RKP Kampung berisi evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahu sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung maupun melalui kerja sama antara Kampung/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemetintahan dan lebih tinggi. RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Kampung

paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penerapan. Menurut Manula I. DK. (1996:28) adalah aktifitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana yang telah ditentukan dengan maksud mewujudkan rencana. Pelaksanaan anggaran Kampung yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Kampung. Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung dilaksanakan melalui rekening khas Kampung. Kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayanya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Maka setelah melaksanakan perencanaan langka selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung yang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan kepada perangkat Kampung. Perangkat Kampung terdiri atas sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat Kampung berkedudukan sebagai unsur membantu kepala Kampung sekretariat Kampung dipimpin oleh sekretaris Kampung dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Kampung bidang administrasi pemerintahan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara Kampung. Kepala Kampung dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Kampung harus menetapkan bendahara Kampung, penetapan bendahara Kampung harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala Kampung.

4. Pelaporan

Bendahara adalah perangkat Kampung yang ditunjukan oleh kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APB Kampung. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Pertanggung jawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan dana keuangan Kampung, kepala Kampung memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014);

Laporan kepada bupati/walikota (melalui camat)

a. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Kampung.

Laporan semester ini terdiri dari laporan semester pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan laporan semester akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung kepada bupati/wali kota setiap akhir tahun.

Laporan ini diserahkan kepada bupati/walikota melalui camat, yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan Kampung. Setelah pemerintah Kampung

dan BPD telah sepakat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung dalam bentuk peraturan Kampung (Perdes), maka perdes ini akan diserahkan kepada bupati/walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Kampung. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Pemendagri No.113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016).

c. Laporan realisasi penggunaan dana Kampung

Laporan Realisasi Dana Kampung disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Kampung dilakukan untuk semester satu paling lambat minggu ke IV (empat) bulan juli T.A berjalan dan untuk semester II paling lambat minggu ke empat bulan januariT.A berikutnya (BPKP, 2015)

Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung yang terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini dilampirkan dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung T.A berkenaan, format laporan kekayaan milik Kampung per 31 Desember tahun anggaran (T.A) berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Kampung. Laporan ini diserahkan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (BPKP,2015)

6. Asas-asas Pengelolaan Dana Kampung

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan Kampung. Asas dimaksud melahirkan perinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan Kampung. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam

tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

a) Transparan

Terbuka-bukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan Kampung dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluru atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b) Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah / lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak – pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut kepala Kampung mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Kampung secara tertip kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

c) Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan ketertiban masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat

menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan Kampung, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Kampung serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Kampung.

d) Tertip dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Kampung. Hal ini dimaksud bahwa pengelolaan keuangan Kampung harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Table 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Ahmad Mustanir dan Darmiah	Implementasi Kebijakan Dana Kampung Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kampung Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	Hasil Penelitian Yang Menunjukkan Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawara Perencanaan Pembangunan Di Desa Teteaji Menunjukkan Bahwa Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawara Perencanaan Pembangunan Di Desa Teteaji Adalah 9 Orang (9,88%) Responden Menjawab Kurang Baik 42 Orang (43,75%) Responden Menjawab Kurang Baik Dan Tidak Ada Responden Yang Menjawab Tidak Baik.	Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2 Tahun 2016 ISSN: 2337-4756
2	Muhammad Dwi Nurfaisal1 Dyah Mutiarin 2 Sakir3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kampung Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten unungkidul Tahun 2016	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari pemerintah desa, masyarakat, dan BPD. Temuan dalam	CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.05, No.01, April 2019 Doi : 10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx

			penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Tegalorejo kurang baik.	
3	Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi dan Denok Kurniasih	Implementasi Kebijakan Dana Kampung	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara Studi Penggunaan DD di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal.	IJPA The Indonesian Journal of Public Administration Volume 3 Nomor 2 Desember 2017. ISSN 2442-5958, E-ISSN 2540-8674
4	Rasmah Hasman	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Karena, Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, kurang	108 e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 107-117. ISSN: 2302-2019
5	Muhammad Faisal dan Umar Nain	Implikasi Pelaksanaan Program Dana Kampung Terhadap Kohesi Sosial Di Kampung Tamalat Kabupaten Takalar.	Pelaksanaan program dana desa berimplikasi positif terhadap kohesi sosial. Berdasarkan koefisien determinasi (R ²), kontribusi pelaksanaan program dana desa terhadap tingkat kohesi sosial adalah 30 persen. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,547 yang berarti hubungan antar variabel berada dalam kategori sedang	Jurnal Sosiohumaniora – Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 3, Nopember 2018: 222 - 230 ISSN 1411 - 0903 : eISSN : 2443-2660
6	Helen Florensi	Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Kampung di Kampung Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri	Hadirnya Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dikelola secara mandiri memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat Desa Cerme. Selain itu, kehadiran ADD juga memberikan keleluasan dari Desa Cerme untuk mengelola pemerintah desa, pembangunan serta sosial kemasyarakatannya secara otonom	Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2, Nomor 1, Januari 2014 ISSN 2303 - 341X.

A. Definisi Oprasional

Indikator-indikator dalam mengukur implementasi program pembangunan kampung di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya :

B. Definisi Operasional

Implementasi secara umum merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sonda, Juliana ; Kiyai, Burhanuddin; Kolondam, Helly;, 2018)

1. Komunikasi adalah kemampuan aparatur kampung Luku-luku dalam menyampaikan informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat Kampung Luku-luku tentang program kampung Dengan sub-sub indikator sebagai berikut :
 - a. Transmisi yaitu Menyalurkan atau meneruskan informasi kepada masyarakat sehingga akan mengurangi penyalta gunaan dalam pelaksanaan program pembangunan kampung di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.
 - b. Kejelasan yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang situasi yang ada di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.
 - c. Konsisten yaitu mengajak masyarakat agar bekerja dalam sebuah implementasi program kampung dengan konsisten waktu yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.
 - d. Partisipasi yaitu kerjasama antara aparat kampung dengan masyarakat agar program kampung berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya yaitu adanya sumber daya manusia di Kampung Luku-Luku dalam implementasi program pembangunan kampung yang didukung dengan, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana prasarana sebagai sumber daya pendukung implementasi program pembangunan Kampung Luku-Luku Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya dengan sub-sub indikator pendukung sebagai berikut.
 - a. Sumber daya manusia dengan memanfaatkan dana kampung adanya aparatur kampung dan masyarakat kampung di Kampung Luku-Luku dalam pembuatan perencanaan pelaksanaan program kampung Luku-luku.
 - b. Sumber daya finansial yaitu Sumber daya keuangan yang ada di Kampung Luku-Luku Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya.
 - c. Sumber daya sarana prasarana yaitu
Adanya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program Kampung Luku-luku Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya

3. Disposisi yaitu karakteristik kepala kampung Oleh karena untuk melaksanakan aktivitas implementasi program pembangunan kampung yang didukung dengan komitmen, kejujuran, sifat demokratis di Kampung Luku-Luku dalam Implementasi program Pembangunan Kampung di Kampung Luku-Luku Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya.
Dengan sub indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Komitmen yaitu kesepakatan bersama antara aparatur kampung bersama masyarakat kampung luku-luku di dalam pelaksanaan program kampung.
 - b. Kejujuran yaitu Sesuatu yang lahir dari dalam hati seseorang atau kelompok untuk melaksanakan implementasi program

pembangunan kampung, di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.

- c. Sifat demokratis yaitu sikap saling menghormati antara kepala kampung dengan masyarakat di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.

4. Struktur Birokrasi adalah struktur pemerintahan yang ada di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.

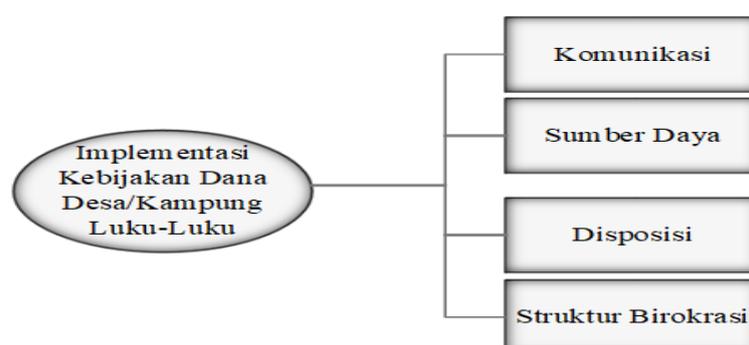
Dengan sub-sub indikator pendukung sebagai berikut

- a. SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu pedoman dalam melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.
- b. Fragmentasi yaitu mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyampaikan pemahaman pandangan-pandangan yang sempit dari aparatur kampung pada masyarakat Kampung Luku-luku.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka Konseptual Penelitian menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008: 45) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variable bebas dengan variable terikat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka konseptual Penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Karakter konseptual penelitian

Pada gambar 2.2 terlihat bahwa implementasi kebijakan dana Kampung/Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan dari empat indicator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.

2. Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau hingga sekarang. Penelitian yang berbasis kuantitatif ini juga dilaksanakan untuk menguji teori atau dugaan sementara dalam penelitian apakah benar atau tidak. Selain sebagai penelitian yang berbasis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field*

research), karena penelitian ini dilaksanakan di lapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya (Hasman, Rasmah, 2015).

Dalam pelaksanaannya, *field research* dilaksanakan dengan menggali data dari lokasi atau lapangan penelitian, yaitu responden yang ada di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Florensi, Helen;, (2014), populasi adalah sekelompok orang, kejadian, maupun segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Masalah populasi timbul terutama pada penelitian opini yang menggunakan metode survey sebagai teknik pengumpulan data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung berjumlah 219 terdiri dari 73 KK. (Sumber : Kantor Kampung Luku-luku, 2021)

2. Sampel

Menurut Florensi, Helen;, (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total *sampel* Menurut Florensi, Helen ;, (2014) sampel ini digunakan apabila jumlah populasi kurang dari seratus (100) orang seluruh populasi dapat dijadikan sampel. Maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 73 KK :

Dengan demikian jumlah sampel sebanyak 73 kepala keluarga yang ada di Kampung Luku-Luku Distrik wadanku Kabupaten Jayawijaya.

D. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi alat atau instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner atau daftar pertanyaan yang bersifat tertutup dimana pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa. Sehingga responden ditambahkan dalam pembentukan persiapan melakukan beberapa

alternative saja dengan menggunakan data interval dan sebagai alternative pilihan jawaban sebagai berikut.

- A. Sangat baik = 4
- B. Baik = 3
- C. Kurang baik = 2
- D. Tidak baik = 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langka peneliti untuk mendapatkan data penelitian (Iskandar 2008 :178). Data dan informasi yang menjadi bahan baku penelitian ini dikumpulkan melalui data yang berwujud data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik.

1. Penelitian pustaka

Penelitian pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku literatur, diktat-diktat bahan kulia dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah dan dibutuhkan dalam pembahasan ini.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung kelapangan atau memperoleh data secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu pada Kampung Luku-Luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya dengan menempuh cara-cara sebagai berikut.

a. Pengamatan

Teknik pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan jelas, terutama gejala-gejala yang dilihat dalam penelitian.

b. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Untuk memperoleh data tersebut digunakan kuisisioner yang bersifat tertutup dimana pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban kepada beberapa alternatif saja.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menggunakan analisa skor mengingat ada empat kategori skor maka dapat dikelompokkan dalam empat kelas interval menurut Hasan (2006 : 24) Teknik analisa data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

$$\text{Jumlah skor maksimum} = 4 \times 73 = 290$$

$$\text{Jumlah skor minimum} = 1 \times 73 = 73$$

Tabel 3.1.
Tabel Interpretasi Skor

No	Interval Jumlah Skor	Predikat
1	$219 < \text{Jumlah skor} \leq 290$	Sangat baik
2	$146 < \text{Jumlah skor} \leq 219$	Baik
3	$73 < \text{Jumlah skor} \leq 146$	Kurang baik
4	$1 < \text{Jumlah skor} \leq 73$	Tidak Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan lokasi penelitian

a. Letak dan luas wilayah Kampung Luku-luku

Kampung Luku-luku merupakan salah satu kampung dari wilayah Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya (Wamena), luas wilayah Kampung Luku-luku sendiri adalah 650. Kampung Luku-luku adalah salah satu kampung dari 5 kampung dari 4 kampung yang ada dalam wilayah Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya secara administrasi batas wilayah Kampung Luku-luku yaitu diantara :

- 1) Sebelah utara perbatasan dengan Kampung Yomosimo.
- 2) Sebelah selatan perbatasan dengan Kampung Agulimo.
- 3) Sebelah barat perbatasan dengan Kampung Wagasilimo
- 4) Sebelah timur perbatasan dengan Kampung Mosiem

Wilayah Kampung Luku-luku ini memiliki daerah bukit atau pegunungan dengan ketinggian 1600. Meter dari permukaan kali dengan suhu udara rata-rata 25 °C sedangkan jarak dari kantor distrik wadanku adalah sebagai berikut :

1. Jarak dari kantor distrik ke kampung Luku-luku adalah 4-5 Km.
2. Jarak dari ibu kota pemerintahan Kabupaten Jayawijaya yaitu wamena ke kampung Luku-luku 53 Km.

b. Keadaan Iklim

Iklim di wilayah distrik wadanku pada umumnya termasuk kampung luku-luku sama dengan daerah gunung atau perbukitan lain di Indonesia terutama pada ketinggian 1600 Meter diatas permukaan air laut, yaitu teriklim tropis basa dengan suhu udara rata-rata 25⁰C sehingga siang

hari udara terasa panas sedangkan pada malam harinya suhu udara rata-rata berkisar 23.9 °C suhu ini agag dingin pada malam hari.

c. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bercocok tanaman atau bertani di ladang kebiasaan masyarakat kampung luku-luku menanam berbagai jenis tanaman yang mereka tentukan sendiri sesuai dengan kondisi tana di tempat penduduk mayoritas menanam Petatas atau Ubi (Hipere) dan Kol di samping itu mereka juga tidak terlepas dengan jenis tanaman lainnya seperti sayur-sayuran, buah dan ubi-ubian.

Disamping bertani mereka juga berternak Babi (Wam), Kelenci, Ayam dan ternak jenis lainnya masyarakat ada yang mempunyai kios-kios kecil dan juga pasar tradisional.

d. Keadaan Kesehatan

Kampung Luku-luku saat ini memiliki Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) yang merupakan balai pengobatan bagi masyarakat. Jika mau berobat pergi ke puskesmas kurulu.

e. Keadaan Pendidikan

Agar pendidikan Kampung Luku-luku dapat bersekolah dengan baik maka kampung tersebut telah mempunyai satu buah sekolah dasar inpres dengan sebuah ruang kantor sekolah.

f. Keadaan Agama

Penduduk memeluk agama kristen Katolik dan Kristen Protestan, jumlah penduduk agama kristen Katolik dan kristen Protestan sebanding, tidak ada agama mayoritas, sarana ibada (Gereja) terdapat 1 buah Gereja Katolik dan 1 buah Gereja Protestan.

g. Keadaan Penerangan

Kampung luku-luku tidak memiliki listrik masing-masing rumah tidak menggunakan untuk penerangan.

h. Keadaan Pemerintahan

1. Struktur Organisasi Kampung Luku-luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya di sajikan pada gambar 4.1.

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Luku-luku Distrik Wadanku
Kabupaten Jayawijaya



Sumber : Kantor Kampung Luku-luku Tahun 2021

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi aparatur kampung sebagai berikut

1. Kepala Kampung :

- a) Tugas kepala kampung adalah menyelenggarakan pemerintahan kampung melaksanakan pembangunan kampung pembinaan masyarakat kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung dan fungsi kepala kampung.
- b) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan aparat kampung dan badan musyawara kampung (BMK).
- c) Membina ketentraman dan ketertiban kampung dan membina pembangunan masyarakat meliputi pembinaan sarana prasarana perekonomian produksi dan pembinaan pembangunan dan pembinaan lingkungan hidup.

- d) Membina kesejahteraan sosial.
- e) Membina pelayanan umum.
- f) Menyusun rencana dan program pembinaan administras.

2. Sekertaris Kampung

Sekertaris kampung bertanggungjawab kepada kepala kampung dan tugas fungsi memberikan saran dan pendapat kepada kepala kampung dan serta mengendalikan dan mengawasi semua unsur kegiatan sekertaris kampung memberikan informasi mengenai keadaan sekertariat kampung dan keadaan umum kampung merumuskan program kegiatan melaksanakan surat menyurat kearsipan dan laporan dan mengadakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat dan menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja kampung.

3. Seksi Pemerintahan.

Mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan melakukan pembinaan kepada pemerintahan kampung.

4. Seksi Pembangunan

Mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan dan penyusunan program serta melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan dan fungsinya.

5. Seksi Umum

Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan bertanggung jawab kepada kepala kampung dan fungsinya untuk menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas untuk mengordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial dan fungsinya dan menyusun program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial membina

kepemudaan peranan wanita dan olahraga dan membina kehidupan beragama pendidikan dan kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

2. Keadaan Responden

Keadaan responden yang diteliti yaitu jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan agama keadaan responden tersebut disajikan sebagai berikut

a. Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin

Keadaan menurut jenis kelamin disajikan pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1	Laki-Laki	55	75,34
2	Perempuan	18	24,65
	Jumlah :	73	100

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55 atau 73,34% responden yang jenis kelamin perempuan sebanyak 18 atau 24,63%.

b. Keadaan Responden Menurut Pendidikan

keadaan responden menurut pendidikan disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Keadaan Responden Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentasi
1	SMP	47	64,38
2	SD	26	35,61
	Jumlah :	73	100

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa responden dengan tingkat jumlah responden SMP sebanyak 47 orang atau 64,38% pendidikan SD sebanyak 26 orang atau 35,61%.

c. Keadaan Responden Menurut Pekerjaan

Keadaan responden menurut pekerjaan disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Keadaan Responden Menurut Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Presentasi
1	Petani	56	76,71
2	Pegawai Negeri Sipil	4	5,47
3	Tukang	13	17,80
	Jumlah :	73	100

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

pada tabel 4.3 terlihat bahwa responden yang berstatus sebagai petani sebanyak 56 orang, atau 76,71% responden yang Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 orang atau 5,47% responden yang sebagai tukang sebanyak 13 orang atau 17,80%.

d. Keadaan Responden Menurut Agama

Keadaan responden menurut agama disajikan pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Keadaan Responden Menurut Agama

No	Status	Frekuensi	Presentasi
1	Katolik	37	50,68
2	Protestan	36	49,31
	Jumlah :	73	100

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.4 tersebut terlihat bahwa jumlah responden yang beragama Katolik sebanyak 37 atau 50,68% orang yang beragama protestan sebanyak 36 orang atau 49,31%.

3. Analisa Data

Analisa data menggunakan perhitungan skor, analisa data dimulai dari penilaian terhadap masing-masing pertanyaan yang terdapat pada setiap indikator dari hasil pengolahan kuisioner diperoleh data-data tentang implementasi kebijakan program dana kampung di Kampung Luku-luku yang disajikan sebagai berikut

a. Indikator Komunikasi

1. Transmisi

Indikator ini terdiri dari 3 pertanyaan yang disajikan dan dijelaskan sebagai berikut disajikan pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terkait Dengan Informasi Tentang
Pembangunan Perumahan Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Mengetahui	4	36	144
2	Mengetahui	3	20	60
	Kurang Mengetahui	2	13	26
	Tidak Mengetahui	1	4	4
	Total		73	234

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mengetahui 36 responden atau jumlah skor 144 yang menjawab mengetahui 20 orang atau jumlah skor 60 yang menjawab kurang mengetahui 13 orang atau jumlah skor 26 yang menjawab tidak mengetahui 4 orang jumlah skor 4. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.6.
Tanggapan Responden Terkait Keikut Sertaan Dalam Pengalokasian Dana Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Menikuti	4	27	108
2	Mengikuti	3	26	78
3	Kurang Mengikuti	2	17	34
4	Tidak Mengikuti	1	3	3
	Jumlah		73	223

Sumber Data : Olahan Data Primer

Pada tabel 4.6. terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mengikuti 27 orang dengan skor nilai 108 orang responden yang menjawab mengikuti 26 orang dengan skor nilai 78 responden yang menjawab kurang mengikuti 17 orang dengan skor nilai 34 responden yang menjawab tidak mengikuti 3 orang dengan skor nilai 3 total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 223 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.7.
Tanggapan Responden Terkait Dengan Mengetahui Informasi Tentang Pengelolaan Dana Kampung.

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Mengetahui	4	27	108
2	Mengetahui	3	36	108
3	Kurang Mengetahui	2	13	26
4	Tidak Mengetahui	1	4	4
	Jumlah		73	246

Sumber Data : Olahan Data Primer

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa responden yang menjawab mengetahui 27 orang dengan skor nilai 108 responden yang menjawab mengetahui 36 orang dengan skor nilai 108 responden yang menjawab kurang mengetahui 13 orang dengan skor nilai 26 responden yang

menjawab tidak mengetahui 4 orang dengan skor nilai 4 total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 246. Jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

b. Indikator Komunikasi

3. Kejelasan

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang di jelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden tentang mendapatkan pencerahan pengolahan dana kampung disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Tentang Mendapatkan Pencerahan Tentang Pengolahan Dana Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Mengetahui	4	27	108
2	Mengetahui	3	26	78
3	Kurang Mengetahui	2	17	34
	Tidak Mengetahui	1	3	3
	Jumlah :		73	223

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mengetahui 27 orang atau jumlah skor 108 yang menjawab mengetahui 26 orang jumlah skor 78 orang yang menjawab kurang mengetahui 17 orang jumlah skor 34 orang yang menjawab tidak mengetahui 3 orang jumlah skornya 3 orang. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 223 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.9.
Tanggapan Responden Terkait Berapa Banyak Dana Yang Digunakan Untuk Pembangunan Jalan Dan Jembatan

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Mengetahui	4	36	144
2	Mengetahui	3	20	60
3	Kurang Mengetahui	2	13	26
4	Tidak Mengetahui	1	4	4
	Total		73	234

Sumber Data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.9 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mengetahui 36 orang dengan jumlah skor 144 responden yang menjawab mengetahui 20 orang dengan jumlah skor 60 responden yang menjawab kurang mengetahui 13 orang dengan jumlah skor 26 responden yang menjawab tidak mengetahui 4 orang dengan jumlah skor 4 total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika di interpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.10.
Tanggapan Responden Terkait Dilibatkan Dalam Muskam Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Mengikuti	4	27	108
2	Mengikuti	3	20	60
3	Kurang Mengikuti	2	13	26
4	Tidak Mengikuti	1	4	4
	Total		73	227

Sumber Data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mengetahui 27 orang dengan jumlah skor 108 responden yang menjawab mengetahui 20 orang dengan jumlah skor 60 responden yang menjawab kurang mengetahui 13 orang dengan jumlah skor 26 responden yang menjawab tidak mengetahui 4 orang dengan jumlah skor 4 total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 227 jika di interprestasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

c. Indikator Komunikasi

3. Konsisten

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden tentang konsisten dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kampung.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Tentang Pengambilan Keputusan Tentang
Pembangunan Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat konsisten	4	27	108
2	Konsisten	3	36	108
3	Kurang konsisten	2	2	4
4	Tidak konsisten	1	8	8
	Jumlah :		73	234

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.11 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat konsisten 27 orang dengan skor nilai 108 orang responden yang menjawab konsisten 36 orang dengan skor nilai 108 responden yang menjawab kurang konsisten 2 orang dengan skor nilai 4 responden yang menjawab tidak konsisten 8 orang dengan skor nilai 8 orang. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Yang Ada Di Kampung Luku-luku Berjalan Sesuai Dengan Kesepakatan Yang Sudah Ada

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat Baik	4	36	144
2	Baik	3	20	60
3	Kurang Baik	2	13	26
4	Tidak Baik	1	4	4
	Jumlah :		73	236

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.12 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 36 orang dengan skor nilai 144 orang responden yang menjawab baik 20 orang dengan skor nilai 60 responden yang menjawab kurang baik 13 orang dengan skor nilai 26 responden yang menjawab tidak baik 4 orang dengan skor nilai 4. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Program Kampung Selaras Dengan Kesepakatan Bersama

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat Baik	4	36	144
2	Baik	3	13	26
3	Kurang Baik	2	20	60
4	Tidak Baik	1	4	4
	Jumlah :		73	234

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 36 orang dengan skor nilai 144 orang responden yang menjawab baik 13 orang dengan skor nilai 26 responden yang menjawab kurang baik 20 orang dengan skor nilai 60 responden yang menjawab tidak baik 4 orang

dengan skor nilai 4. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

d. Indikator komunikasi

4. Partisipasi

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden tentang keikutsertaan dalam pengelolaan dana kampung tentang pembangunan perumahan pada tabel 4.8.

Tabel 4.14
Tanggapan responden tentang keikutsertaan dalam pengelolaan dana kampung tentang pembangunan perumahan

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat mengikuti	4	36	144
2	Mengikuti	3	13	39
3	Kurang mengikuti	2	20	40
4	Tidak mengikuti	1	4	4
	Jumlah		73	227

Sumber data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mengikuti 36 dengan skor nilai 144 responden yang menjawab mengikuti 13 dengan skor nilai 39 responden yang menjawab kurang mengikuti 20 orang dengan skor nilai 40 responden yang menjawab tidak mengikuti 4 orang dengan skor nilai 4. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 227 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat mengikuti.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Tentang Pengalokasian Dana Di Masing-Masing Program Kampung Yang Ada

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat Berperan	4	26	104
2	Berperan	3	4	12
3	Kurang Berperan	2	17	34

4	Tidak Berperan	1	23	23
	Jumlah		73	173

Sumber data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.15 terlihat bahwa responden yang menjawab berperan 26 dengan skor nilai 104 responden yang menjawab berperan 4 dengan skor nilai 12 responden yang menjawab kurang berperan 17 orang dengan skor nilai 34 responden yang menjawab tidak berperan 23 orang dengan skor nilai 23. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 173 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.16

Tanggapan Responden Tentang Kerjasama Antara Masyarakat Kampung Dengan Aparat Kampung Dalam Pembangunan Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat Baik	4	27	108
2	Baik	3	24	72
3	Kurang Baik	2	17	34
4	Tidak Baik	1	4	4
	Jumlah		73	218

Sumber data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.16 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 27 dengan skor nilai 108 responden yang menjawab baik 24 dengan skor nilai 72 responden yang menjawab kurang baik 17 orang dengan skor nilai 34 responden yang menjawab tidak baik 4 orang dengan skor nilai 4. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 218 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

I. Indikator Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden tentang kemampuan untuk membuat laporan penggunaan dana kampung setiap kampung disajikan pada tabel 4.9

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Untuk Membuat
Laporan Penggunaan Dana Kampung Setiap Tahun

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat mampu	4	30	120
2	Mampu	3	26	38
3	Kurang mampu	2	13	26
4	Tidak mampu	1	4	4
	Jumlah :		73	188

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.9 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mampu 30 orang dengan skor nilai 120 responden yang menjawab mampu 26 orang dengan skor nilai 38 responden yang menjawab kurang mampu 13 orang dengan skor nilai 26 responden yang menjawab tidak mampu 4 orang dengan skor nilai 4. Total jumlah skor nilai untuk pertanyaan ini adalah 188 jika diinterpretasikan termasuk kurang baik. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Tentang Aparat Kampung Luku-Luku Mampu
Untuk Menyampaikan Penggunaan Dana Kampung Di Setiap
Program Masing-Masing

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat mampu	4	36	144
2	Mampu	3	13	39
3	Kurang mampu	2	20	40
4	Tidak mampu	1	4	4
	Jumlah :		73	227

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.18 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mampu 36 orang dengan skor nilai 144 responden yang menjawab mampu 13 orang dengan skor nilai 39 responden yang menjawab kurang mampu 20 orang dengan skor nilai 40 responden yang menjawab tidak mampu 4 orang dengan skor nilai 4. Total jumlah skor nilai untuk pertanyaan ini adalah 227 jika diinterpretasikan termasuk Sangat Baik.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Tentang Aparat Kampung Luku-Luku Mampu Mendata Masyarakat Yang Ada Di Kampung Luku-Luku

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat mampu	4	36	144
2	Mampu	3	20	60
3	Kurang mampu	2	13	26
4	Tidak mampu	1	4	4
	Jumlah :		73	234

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.19 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat mampu 36 orang dengan skor nilai 144 responden yang menjawab mampu 20 orang dengan skor nilai 60 responden yang menjawab kurang mampu 13 orang dengan skor nilai 26 responden yang menjawab tidak mampu 4 orang dengan skor nilai 4. Total jumlah skor nilai untuk pertanyaan ini adalah 188 jika interpretasikan termasuk kurang baik. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

b. Indikator Sumber Daya

2. Sumber daya finansial

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di kampung Luku-luku pada tabel 4.10.

Tabel 4.20
Tanggapan Responden Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Yang
Ada Di Kampung Luku-luku

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	50	200
2	Baik	3	6	18
3	Kurang baik	2	10	20
4	Tidak baik	1	7	7
	Jumlah :		73	245

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 50 dengan skor nilai 200 responden yang menjawab baik 6 dengan skor nilai 18 responden yang menjawab kurang baik 10 dengan skor nilai 20 responden yang menjawab tidak baik 7 dengan skor nilai 7. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 245 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.21
Tanggapan Responden Terkait Pengalokasian Dana Kampung Sesuai
Dengan Harapan Masyarakat

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	30	120
2	Baik	3	10	30
3	Kurang baik	2	23	46
4	Tidak baik	1	10	10
	Jumlah :		73	206

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.21 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 30 dengan skor nilai 120 responden yang menjawab baik 10 dengan skor nilai 30 responden yang menjawab kurang baik 23 dengan skor nilai 46 responden yang menjawab tidak baik 10 dengan skor nilai 10. Total

jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 206 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden Terkait Dengan Aparat Kampung Luku-Luku
Membuat Arsip Tentang Keuangan Setiap Tahun

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	26	104
2	Baik	3	4	12
3	Kurang baik	2	17	34
4	Tidak baik	1	26	26
	Jumlah :		73	176

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.22 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 26 dengan skor nilai 104 responden yang menjawab baik 4 dengan skor nilai 12 responden yang menjawab kurang baik 17 dengan skor nilai 34 responden yang menjawab tidak baik 26 dengan skor nilai 26. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 176 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

c. Indikator Sumber Daya

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden tentang pengelolaan sarana prasarana yang ada di kampung Luku-luku di sajikan pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Sarana Prasarana Di
Kampung Luku-luku

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	53	212
2	Baik	3	3	9
3	Kurang baik	2	10	20

4	Tidak baik	1	7	7
	Jumlah :		73	248

Sumber Data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.23 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 53 orang dengan skor nilai 212 responden yang menjawab baik 3 orang dengan skor nilai 9 responden yang menjawab kurang baik 10 orang dengan skor nilai 20 responden yang menjawab tidak baik 7 orang dengan skor nilai 7. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 248 yang jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.24
Tanggapan Responden Terkait Pengelolaan Sarana Prasarana Yang Ada Di Kampung Luku-Luku

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	70	280
2	Baik	3	1	3
3	Kurang baik	2	1	2
4	Tidak baik	1	1	1
	Jumlah :		73	185

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.24 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 70 dengan skor nilai 280 responden yang menjawab baik 1 dengan skor nilai 3 responden yang menjawab kurang baik 1 dengan skor nilai 2 responden yang menjawab tidak baik 1 dengan skor nilai 1. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 185 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.25
Tanggapan Responden Terkait Menjaga Sarana Prasarana Yang Ada Di Kampung Luku-Luku

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	27	108

2	Baik	3	20	60
3	Kurang baik	2	13	26
4	Tidak baik	1	4	4
	Jumlah :		73	198

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.25 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 27 dengan skor nilai 108 responden yang menjawab baik 20 dengan skor nilai 60 responden yang menjawab kurang baik 13 dengan skor nilai 26 responden yang menjawab tidak baik 4 dengan skor nilai 4. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 198 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

1. Indikator Disposisi

a. Komitmen

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden terkait dengan kesepakatan untuk pembangunan pasar tradisional di kampung Luku-luku disajikan pada tabel 4.26.

Tabel 4.26
Tanggapan Responden Terkait Dengan Kesepakatan Untuk Pembangunan Pasar Tradisional Di Kampung Luku-luku

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	35	140
2	Baik	3	21	63
3	Kurang baik	2	10	20
4	Tidak baik	1	7	7
	Jumlah :		73	230

Sumber Data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.12 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 35 orang dengan skor nilai 140 responden yang menjawab baik 21 orang dengan skor nilai 63 responden yang menjawab kurang baik 10 dengan skor nilai 20 responden yang menjawab tidak baik 7 orang dengan

skor nilai 7. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 230 yang jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.27
Tanggapan Responden Terkait Melibatkan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Untuk Pembangunan Pasar Tradisional

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	50	200
2	Baik	3	10	30
3	Kurang baik	2	10	20
4	Tidak baik	1	3	3
	Jumlah :		73	253

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.27 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 50 dengan skor nilai 200 responden yang menjawab baik 10 dengan skor nilai 30 responden yang menjawab kurang baik 10 dengan skor nilai 20 responden yang menjawab tidak baik 3 dengan skor nilai 3. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 253 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.28
Tanggapan Responden Terkait Pembangunan Pasar Tradisional Berjalan Dengan Baik.

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	27	108
2	Baik	3	20	60
3	Kurang baik	2	13	26
4	Tidak baik	1	4	4
	Jumlah :		73	198

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.28 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 27 dengan skor nilai 108 responden yang menjawab baik 20 dengan

skor nilai 60 responden yang menjawab kurang baik 13 dengan skor nilai 26 responden yang menjawab tidak baik 4 dengan skor nilai 4. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 198 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

2. Disposisi

b. Kejujuran

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden terkait dengan pengelolaan dana kampung sesuai dengan kebutuhan program masing-masing disajikan pada tabel 4.29.

Tabel 4.29
Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Dana Kampung Sesuai Dengan Kebutuhan Program Masing-masing

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	60	240
2	Baik	3	10	30
3	Kurang baik	2	1	2
4	Tidak baik	1	2	2
	Jumlah :		73	274

Sumber Data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.29 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 60 dengan skor nilai 240 responden yang menjawab baik 10 dengan skor nilai 30 responden yang menjawab kurang baik 1 dengan skor nilai 2 responden yang menjawab tidak baik 2 dengan skor nilai 2. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 274 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.30
Tanggapan Responden Terkait Masyarakat Percaya Kepada Aparat
Kampung Tentang Pengelolaan Dana Di Setiap Program Masing-
Masing

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	36	144
2	Baik	3	24	73
3	Kurang baik	2	13	13
4	Tidak baik	1	0	0
	Jumlah :		73	230

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.30 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 36 dengan skor nilai 144 responden yang menjawab baik 24 dengan skor nilai 73 responden yang menjawab kurang baik 13 dengan skor nilai 13 responden yang menjawab tidak baik 0 dengan skor nilai 0. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 230 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.31
Tanggapan Responden Terkait Aparat Kampung Dalam Membuat
Laporan Sesuai Dengan Penggunaan Dana Disetiap Program Masing-
Masing

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	70	280
2	Baik	3	1	3
3	Kurang baik	2	2	4
4	Tidak baik	1	0	0
	Jumlah :		73	287

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.31 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 70 dengan skor nilai 180 responden yang menjawab baik 1 dengan skor nilai 3 responden yang menjawab kurang baik 2 dengan skor nilai 4 responden yang menjawab tidak baik 0 dengan skor nilai 0. Total jumlah skor untuk

pertanyaan ini adalah 287 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

3. Indikator Disposisi

c. Sifat Demokratis

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden tentang menerima masukan dari masyarakat tentang pembangunan kampung disajikan pada tabel 4.32

Tabel 4.32
Tanggapan Responden Tentang Menerima Masukan Dari Masyarakat Tentang Pembangunan Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	70	280
2	Baik	3	1	3
3	Kurang baik	2	1	2
4	Tidak baik	1	1	1
	Jumlah :		73	285

Sumber Data : Olahan data primer tahun 2021

Sumber data pada tabel 4.32 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 70 dengan skor nilai 280 responden yang menjawab baik 1 dengan skor nilai 3 responden kurang baik 1 dengan skor nilai 2 responden yang menjawab tidak baik 1 dengan skor nilai 1. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 285 jika diinterpretasikan dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.33
Tanggapan Responden Terkait Aparat Kampung Dengan Masyarakat Saling Menerima Pendapat Demi Kemajuan Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	36	144
2	Baik	3	20	60
3	Kurang baik	2	13	26
4	Tidak baik	1	4	4
	Jumlah :		73	234

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.33 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 36 dengan skor nilai 144 responden yang menjawab baik 20 dengan skor nilai 60 responden yang menjawab kurang baik 13 dengan skor nilai 26 responden yang menjawab tidak baik 4 dengan skor nilai 4. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.34
Tanggapan Responden Terkait Dalam Pembangunan Kampung Ada Perbedaan Pendapat

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	27	100
2	Baik	3	26	78
3	Kurang baik	2	21	42
4	Tidak baik	1	0	0
	Jumlah :		73	220

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.34 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 27 dengan skor nilai 100 responden yang menjawab baik 26 dengan skor nilai 78 responden yang menjawab kurang baik 21 dengan skor nilai 42 responden yang menjawab. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 220 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

1. Struktur Birokrasi

a. SOP

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden terkait rapat penyalagunaan RAPBK di sajikan pada tabel 4.35

Tabel 1.35
Tanggapan Responden Tentang Rapat Penyalagunaan RAPKB

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	30	120
2	Baik	3	25	73
3	Kurang baik	2	17	34
4	Tidak baik	1	5	5
	Jumlah :		73	234

Sumber Data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.35 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 30 dengan jumlah skor nilai 120 responden yang menjawab baik 25 orang dengan jumlah skor nilai 75 responden yang menjawab kurang baik 17 dengan skor nilai 34 responden yang menjawab tidak baik 5 dengan skor nilai 5. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 234 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.36
Tanggapan Responden Terkait Menggunakan Prosedur Belanja Barang Dalam Pengelolaan Dana Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	40	160
2	Baik	3	13	39
3	Kurang baik	2	19	38
4	Tidak baik	1	1	1
	Jumlah :		73	238

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.36 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 40 dengan skor nilai 160 responden yang menjawab baik 13 dengan skor nilai 39 responden yang menjawab kurang baik 19 dengan skor nilai 38 responden yang menjawab tidak baik 1 dengan skor nilai 1. Total jumlah

skor untuk pertanyaan ini adalah 238 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.37
Tanggapan Responden Terkait Dalam Pembangunan Pasar Tradisional Menyalagunakan SOP

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	30	120
2	Baik	3	23	69
3	Kurang baik	2	10	20
4	Tidak baik	1	10	10
	Jumlah :		73	219

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.37 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 30 dengan skor nilai 120 responden yang menjawab baik 23 dengan skor nilai 69 responden yang menjawab kurang baik 10 dengan skor nilai 20 responden yang menjawab tidak baik 10 dengan skor nilai 10. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 219 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

2. Indikator Struktur Birokrasi

b. Fragmentasi

Indikator ini memiliki 3 pertanyaan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tanggapan responden tentang upaya dalam perbedaan pendapat antara masyarakat dan aparat kampung.

Tabel 4.38
Tanggapan Responden Tentang Upaya Dalam Perbedaan Pendapat Antara Masyarakat dan Aparat Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	40	160
2	Baik	3	10	30
3	Kurang baik	2	10	20

4	Tidak baik	1	13	13
	Jumlah :		73	223

Sumber Data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.38 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 40 orang dengan skor nilai 160 responden yang menjawab baik 10 orang dengan skor nilai 30 responden yang menjawab kurang baik 10 dengan skor nilai 20 responden yang menjawab tidak baik 13 dengan skor nilai 13. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 223 jika di interpresentasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.39

Tanggapan Responden Terkait Dengan Ada Upaya Dalam Perbedaan Pendapat Antara Masyarakat Dan Aparat Kampung

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	53	212
2	Baik	3	10	30
3	Kurang baik	2	10	20
4	Tidak baik	1	0	0
	Jumlah :		73	263

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.39 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 53 dengan skor nilai 112 responden yang menjawab baik 10 dengan skor nilai 30 responden yang menjawab kurang baik 10 dengan skor nilai 20 responden yang menjawab tidak baik 0 dengan skor nilai 0. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 263 jika diinterprestasikan termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel 4.40

Tanggapan Responden Terkait Dengan Ada Upaya Dalam Pembangunan Program Masing-Masing Agar Berjalan Dengan Baik

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai
1	Sangat baik	4	15	60
2	Baik	3	15	45

3	Kurang baik	2	30	60
4	Tidak baik	1	13	13
	Jumlah :		73	178

Sumber data : Olahan Data Primer Tahun 2021

Pada tabel 4.40 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 15 dengan skor nilai 60 responden yang menjawab baik 15 dengan skor nilai 45 responden yang menjawab kurang baik 30 dengan skor nilai 60 responden yang menjawab tidak baik 13 dengan skor nilai 13. Total jumlah skor untuk pertanyaan ini adalah 278 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisa data, maka berikut ini dijelaskan pembahasan dari keempat indikator implementasi kebijakan, yaitu indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang disajikan sebagai berikut :

1. Indikator Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, komunikasi yang merupakan salah satu variable penting yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan publik maka implementasi yang efektif akan terlaksana apabila para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan informasi yang diketahui para pengambil keputusan yang bisah didapat melalui komunikasi yang baik (Agustino, 2014:150)

Program kebijakan memerlukan hubungan yang baik antara instansi terkait dengan pengambil manfaat melalui dukungan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi dan masyarakat bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Penilaian terhadap indikator komunikasi dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor dari ke tiga keempat sup indikator yang di sajikan pada tabel 4.41.

Tabel 4.41
Perolehan skor untuk indikator komunikasi

No	Uraian Tugas	Jumah Skor	Predikat
1	Transmisi a. Mendapatkan informasi tentang pembangunan perumahan.	234	Sangat baik
	b. Keikutsertaan dalam pengalokasian dana kampung.	223	Sangat baik
	c. Mengetahui informasi tentang pengelolaan dana kampung	246	Sangat baik
2	Kejelasan a. Mendapatkan pencerahan tentang pengolahan dana kampung.	223	Sangat baik
	b. Berapa banyak dana yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.	234	Sangat baik
	c. Keterlibatan masyarakat dalam muskam kampung.	227	Sangat baik
3	Konsisten a. Pengambilan keputusan tentang pembangunan kampung.	234	Sangat baik
	b. Pembangunan yang ada di kampung luku-luku berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada.	236	Sangat baik
	c. Pengelolaan program kampung selaras dengan kesepakatan bersama.	234	Sangat baik
4	Partisipasi a. Keikutsertaan dalam pengelolaan dana kampung tentang pembangunan perumahan.	227	Sangat baik
	b. Pengalokasian dana di masing-masing program kampung yang ada.	173	Baik
	c. Kerjasama antara masyarakat kampung dengan aparat kampung dalam pembangunan kampung.	218	Sangat baik
Jumlah		225,75	Sangat baik
Rata-rata		225	

Sumber Data : Olahan data primer tahun 2021

Pada tabel 4.41 terlihat bahwa perolehan rata-rata skor untuk indikator komunikasi. Bagian mendapatkan informasi tentang pembangunan

perumahan memperoleh skor nilai 234 yang termasuk predikat sangat baik aspek keikutsertaan dalam pengalokasian dana kampung dengan skor nilai 223 yang termasuk predikat sangat baik aspek mengetahui informasi tentang pengelolaan dana kampung dengan skor nilai 246 yang termasuk predikat sangat baik. Aspek mendapatkan pencerahan tentang pengolahan dana kampung dengan skor nilai 223 yang termasuk predikat sangat baik. Aspek berapa banyak dana yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan dengan skor nilai 234 yang termasuk predikat sangat baik. Aspek keterlibatan masyarakat dalam muskam kampung dengan skor nilai 227 yang termasuk predikat sangat baik. Aspek pengambilan keputusan tentang pembangunan kampung dengan skor nilai 234 yang termasuk dalam predikat sangat baik. Aspek pembangunan yang ada di kampung luku-luku berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada dengan skor nilai 236 yang termasuk predikat sangat baik. Aspek pengelolaan program kampung selaras dengan kesepakatan bersama dengan skor nilai 234 yang termasuk predikat sangat baik. Aspek keikutsertaan dalam pengelolaan dana kampung tentang pembangunan perumahan dengan skor nilai 227 yang termasuk predikat sangat baik. Aspek pengalokasian dana di masing-masing program kampung yang ada dengan skor nilai 173 yang termasuk predikat baik. Aspek kerjasama antara masyarakat kampung dengan aparat kampung dalam pembangunan kampung dengan skor nilai 218 yang termasuk predikat sangat baik. Nilai rata-rata indikator komunikasi adalah 225,75 dengan predikat sangat baik.

2. Indikator sumber daya

Sumber daya yang dapat memberi dukungan dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat berwujud seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial sumber daya ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tanpa sumber daya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dan pelaksana kebijakan anggaran dibutuhkan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menjadi penghambat proses kebijakan.

Dalam mengimplementasi suatu kebijakan sumber daya memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh aparat yang memadai kualifikasi (Mutu) aparat sarana dan prasarana yang memadai begitu pula dengan dukungan dana operasional yang disediakan memadai.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Nugroho 2014:628) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) sumber daya material (*Material Resources*) dan sumber daya metode (*Method Resources*) sumber daya yang paling penting dari ke tiga sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia karena disamping sebagai sumbejek implementasi kebijakan sekaligus juga sebagai objek factor sumber daya ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Penilaian terhadap indikator sumber daya dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor dari ke empat sub indikator yang disajikan pada tabel 4.42

Table 4.42
Perolehan skor untuk indikator sumber daya

No	Uraian Tugas	Jumah Skor	Predikat
1	Sumber daya manusia a. Kemampuan untuk membuat laporan penggunaan dana kampung setiap tahun.	188	Sangat baik
	b. Aparat kampung Luku-luku mampu untuk menyampaikan penggunaan dana kampung disetiap program masing-masing.	227	Sangat baik
	c. Aparat kampung Luku-luku mampu mendata masyarakat yang ada di kampung Luku-luku.	234	Sangat baik

2	Sumber daya finansial a. Terkait dengan pengolahan keuangan yang ada di kampung Luku-luku	245	Sangat baik
	b. Pengalokasian dana kampung sesuai dengan harapan masyarakat.	206	Baik
	c. Terkait dengan aparat kampung Luku-luku membuat arsip tentang keuangan setiap tahun.	176	Cukup baik
3	Sumber daya sarana prasarana a. Pengelolaan sarana prasarana di kampung Luku-luku.	248	Baik
	b. Pengelolaan sarana prasarana yang ada di kampung Luku-luku.	285	Baik
	c. Menjaga sarana prasarana yang ada di kampung Luku-luku.	198	Baik
Jumlah		1907	Sangat baik
Rata-rata		211,75	

Sumber data : Olahan data primer 2021

Pada tabel 4.42 terlihat bahwa perolehan rata-rata skor untuk indikator sumber daya adalah 476,75 yang termasuk pada predikat sangat baik perihal yang terkait dengan aspek tentang aparat kampung Luku-luku mampu untuk menyampaikan penggunaan dana kampung disetiap program masing-masing memperoleh skor nilai 227 yang termasuk predikat sangat baik aspek aparat kampung Luku-luku mampu mendata masyarakat yang ada di kampung Luku-luku memperoleh skor nilai 224 yang termasuk pada predikat sangat baik aspek aparat kampung Luku-luku mampu mendata masyarakat yang ada di kampung Luku-luku memperoleh skor nilai 234 yang termasuk pada predikat sangat baik aspek terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di kampung Luku-luku memperoleh skor nilai 245 yang termasuk predikat sangat baik aspek terkait pengalokasian dana kampung sesuai dengan harapan masyarakat memperoleh skor nilai 206 yang termasuk predikat baik aspek terkait dengan aparat kampung Luku-luku membuat arsip tentang keuangan setiap tahun memperoleh skor nilai 176

yang termasuk pada predikat cukup baik aspek tentang pengelolaan sarana prasarana di kampung Luku-luku memperoleh skor nilai 248 yang termasuk predikat baik aspek terkait pengelolaan sarana prasarana yang ada di kampung Luku-luku memperoleh skor nilai 185 yang termasuk pada predikat baik aspek terkait menjaga sarana prasarana yang ada di kampung Luku-luku memperoleh skor nilai 198 yang termasuk pada predikat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan para pelaksana memberikan dorongan kepada masyarakat dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang terkait dengan penggunaan dana kampung tersebut termasuk sangat baik hal ini dikarenakan pelaksana termasuk pendamping telah dibekali pengetahuan oleh pemetintah daerah untuk mengelola dana tersebut tim pendamping yang tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan dana kampung juga sudah bekerja dengan baik baik turun ke kampung untuk mengomunikasikan segala hal yang terkait dengan dana kampung kelengkapan sarana prasarana dalam mendukung kebijakan ADD cukup tersedia misalnya pengetahuan aparatur pelaksana yang telah dibekali pelatihan tempat (Kantor kampung) yang cukup baik yang dilengkapi Laptop, Printer Meja Kursi fasilitas listriknya belum ada semuanya dapat digunakan untuk pertemuan dan pembuatan laporan masyarakat juga memberikan dukungan berupa tenaga yang dibutuhkan pada saat kegiatan tetapi tidak semua masyarakat ikut bekerja karena ada kesibukan lain sumbangan dalam bentuk material bangunan biasanya masyarakat jarang memberikan karena keterbatasan ekonomi sumbangan biasanya dalam bentuk makanan seperti ubi jalar dan babi yang dimakan bersama. Nilai rata-rata indikator sumber daya adalah 211,75 predikat sangat baik.

3. Indikator disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sarana karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas dan wewenang fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dapat diinginkan oleh pembuat kebijakan sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:197) mengemukakan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan factor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif adanya hanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar dalam imlementasi kebijakan yang akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal demikian sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap satu implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala penilaian terhadap indikator disposisi dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor dari ketiga sub indikator yang disajikan pada tabel 4.43.

Tabel 4.43
Perolehan skor untuk indikator disposisi

No	Uraian Tugas	Jumah Skor	Predikat
1	Komitmen a. Terkait dengan kesepakatan untuk pembangunan pasar tradisional di kampung Luku-luku.	230	Sangat baik
	b. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana untuk pembagunan pasar tradisional.	253	Sangat baik
	c. Pembangunan pasar tradisional berjalan dengan baik.	198	Baik
2	Kejujuran a. Pengelolaan dana kampung sesuai dengan kebutuhan program masing-masing	274	Cukup baik
	b. Masyarakat percaya kepada aparat kampung tentang pengelolaan dana disetiap program masing-masing.	230	Sangat baik
	c. Aparat kampung Dalam membuat laporan sesuai dengan penggunaan dana di setiap program masing-masing.	287	Sangat baik
3	Sifat demokratis a. Menerima masukan dari masyarakat tentang pembangunan kampung	285	Sangat baik
	b. Aparat kampung dengan masyarakat saling menerima pendapat demi kemajuan kampung	234	Sangat baik
	c. Dalam pembangunan kampung ada perbedaan pendapat.	220	Sangat baik
Jumlah		2,211	Sangat baik
Rata-rata		245	

Sumber data : Olahan data primer Tahun 2021

Pada tabel 4.43 terlihat bahwa perolehan rata-rata skor untuk indikator disposisi 552, 75 yang termasuk predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan kesepakatan untuk pembangunan pasar tradisional menunjukkan perolehan skor 230 yang termasuk predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana untuk pembangunan pasar tradisional memperoleh skor 253 yang termasuk

predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan pembangunan pasar tradisional berjalan dengan baik memperoleh skor 198 yang termasuk dalam predikat baik perihal yang berkaitan dengan pengelolaan dana kampung sesuai dengan kebutuhan program masing-masing memperoleh skor 274 yang termasuk predikat cukup baik perihal yang berkaitan dengan masyarakat percaya kepada aparat kampung tentang pengelolaan dana di setiap program masing-masing memperoleh skor 230 yang termasuk dalam predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan aparat kampung dalam membuat laporan sesuai dengan penggunaan dana disetiap program masing-masing memperoleh skor 287 yang termasuk dalam predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan menerima masukan dari masyarakat tentang pembangunan kampung memperoleh skor 285 yang termasuk predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan aparat kampung dan masyarakat saling menerima pendapat demi kemajuan kampung memperoleh skor 234 yang termasuk predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan dalam pembangunan kampung ada perbedaan pendapat memperoleh skor 220 yang termasuk dalam predikat sangat baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan pelaksana dalam mengimplementasikan ADD masih kurang baik artinya pada saat sosialisasi semua hal yang berkaitan dengan implementasi ADD disampaikan tetapi pada saat pelaksanaan laporan tidak semuanya disampaikan secara terbuka terutama masalah keuangan berkaitan dengan laporan keuangan dilaksanakan oleh kepala kampung dan secara teknis dilaksanakan oleh bendahara kampung laporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan alokasi dana desa dan dilaporkan kepada bupati melalui kepala distrik pelaporan keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban biasanya laporan pertanggungjawaban ini kurang transparan diketahui masyarakat sedangkan aspek keadilan sudah cukup baik selama penggunaan ADD masyarakat dapat menerima baik secara fisik melalui pembangunan

infrastruktur maupun nonfisik. Nilai rata-rata indikator disposisi adalah 245 dengan predikat sangat baik.

4. Indikator struktur birokrasi

Menurut Muliadi (2015:29) struktur birokrasi menekankan bahwa struktur menjadi penting dalam implementasi kebijakan aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure (SOP)* yang dicantumkan dalam *guide line program* kebijakan *Edwards III* dalam *Winarmo* (2014:206) ada dua karakteristik utama di dalam birokrasi yakni : *Standar Operasional Prosedur (SOP)* merupakan sebuah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya menurut Agustino (2014:153) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (*Pelaksanaan kebijakan Administrator Birokrat*) untuk bias melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatan pada setiap hari sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan (Standar minimum yang dibutuhkan masyarakat).

Frakmentasi merupakan bagi tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisah memerlukan koordinasi umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan semakin berkurang kemungkinan dalam keberhasilan program atau kebijakan menurut Agustino (2014:154) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas masyarakat diantara beberapa unit kerja.

Penilaian terhadap indikator struktur birokrasi dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor dari ketiga sub indikator yang disajikan pada tabel 4.44

Tabel 4.44
Perolehan skor untuk indikator struktur birokrasi

No	Uraian Tugas	Jumah Skor	Predikat
1	SOP a. Rapat penyalagunaan RAPKB	234	Sangat baik
	b. Menggunakan prosedur belanja barang dalam pengelolaan dana kampung.	238	Sangat baik
	c. Dalam pembangunan pasar tradisional penyalagunaan SOP.	219	Sangat baik
2	Fragmentasi a. Upaya dalam perpedaan pendapat antara masyarakat dan aparat kampung.	223	Sangat baik
	b. Dengan adanya upaya dalam perbedaan pendapat antara masyarakat dan aparat kampung.	263	Sangat baik
	c. Adanya upaya dalam pembangunan program masing-masing agar berjalan dengan baik.	178	Baik
Jumlah		1,355	Sangat baik
Rata-rata		225,75	

Sumber data : Olahan data primer Tahun 2021

Pada tabel 4.44 terlihat bahwa perolehan rata-rata skor untuk indikator struktur birokrasi adalah 338,75 yang termasuk pada predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan tentang rapat penyalagunaan RAPKB memperoleh skor 234 yang termasuk dalam predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan menggunakan prosedur belanja barang dalam pengelolaan dana kampung memperoleh skor 238 yang termasuk dalam predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan dalam pembangunan pasar tradisional menyalagunakan SOP memperoleh skor 219 perihal yang berkaitan dengan upaya dalam perbedaan pendapat antara masyarakat dan aparat kampung memperoleh skor 223 yang termasuk dalam predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan adanya upaya dalam perbedaan pendapat antara masyarakat dan aparat kampung memperoleh skor 263 yang termasuk predikat sangat baik perihal yang berkaitan dengan adanya

upaya dalam pembangunan program masing-masing agar berjalan dengan baik memperoleh skor 178 yang termasuk predikat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana dibuat oleh aparat kampung bersama toko-toko masyarakat yang ada dalam BPK sebelum implementasi kebijakan ADD struktur organisasi itu adalah tim pelaksana ADD yaitu kepala kampung selaku penanggungjawab operasiona kegiatan (PJOK) sekertaris kampung selaku penanggungjawab administrasi kegiatan (PJAK) kepala urusan keuangan selaku bendahara kampung pembagian tugas dilaksanakan sesuai struktur organisasi ADD dan menjalankannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing pada pelaksanaan tugas tidak pernah terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan dana kampung karena pembagian tugas sudah jelas.

Nilai rata-rata indikator struktur birokrasi adalah 225,75 dengan predikat sangat baik.

5. Rekapitulasi rata-rata skor tentang implementasi kebijakan program

dana kampung di kampung Luku-luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan perolehan skor dari setiap indikator maka untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan program dana kampung di kampung Luku-luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya diperlukan rekapitulasi perolehan skor dari masing-masing indikator tersebut yang disajikan pada tabel 4.45

Tabel 4.45

Rekapitulasi perolehan skor rata-rata tentang implementasi kebijakan program dana kampung di kampung Luku-luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya

Nomor	Indikator	Skor	Predikat
1	Komunikasi	225,75	Sangat baik
2	Sumber daya	211,75	Sangat baik
3	Disposisi	245	Sangat baik

4	Struktur birokrasi	225,8	Sangat baik
	Jumlah	908,35	Sangat baik
	Rata-rata	227,08	

Sumber data : Olahan data primer Tahun 2021

Pada tabel 4.45 terlihat bahwa indikator komunikasi peroleh skor 225,75 dengan predikat sangat baik indikator sumber daya perolehan skor 211,75 dengan predikat sangat baik indikator disposisi perolehan skor 245 yang termasuk predikat sangat baik indikator struktur birokrasi perolehan skor 225,8 yang termasuk predikat sangat baik rata-rata perolehan skor untuk keempat indikator adalah 227,08 yang termasuk pada predikat baik artinya bahwa implementasi kebijakan program dana kampung di kampung Luku-luku Distrik Wadanku Kabupaten Jayawijaya selama Tahun 2017-2019 pelaksanaannya adalah sangat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan implementasi dana kampung dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat pada saat pertemuan atau rapat masyarakat cukup memahami apa yang disampaikan dan mereka mengatakan bahwa informasi mengenai dana tersebut jelas baik sumber jumlah dan penggunaannya.

Sumber daya menunjukkan bahwa pelaksanaan termasuk pendamping telah dibekali pengetahuan oleh pemerintah daerah untuk mengelola dana tersebut tim pendamping yang tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan dana kampung juga sudah bekerja dengan baik turun ke kampung untuk mengomunikasikan segala hal yang terkait dengan dana kampung sarana prasarana dalam mendukung kebijakan ADD cukup tersedia misalnya pengetahuan aparatur pelaksana yang telah dibekali pelatihan tempat (Kantor kampung) yang cukup baik yang dilengkapi dengan peralatan kerja menggunakan genset atau disel.

Sehubungan dengan indikator disposisi yang termasuk tidak baik hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan pelaksana dalam

mengimplementasikan ADD masih kurang baik pelaporan keuangan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) biasanya laporan pertanggungjawaban ini kurang transparan diketahui masyarakat sedangkan aspek keadilan sudah cukup baik karena selama penggunaan ADD masyarakat menerima manfaat baik secara fisik melalui pembangunan infrastruktur maupun secara nonfisik hasil ini disesuaikan sebagaimana yang dikemukakan oleh George Casper Edward III dalam Subarsono (2011:92) bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementor atau pelaksana seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Aspek struktu birokrasi yang dinilai dari pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi program dana kampung yang dibuat pelaksana menjalankannya sesuai prosedur atau petunjuk yang ada dengan kewenangannya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa indikator komunikasi kategori sangat baik dengan perolehan skor 225,75 indikator sumber daya kategori sangat baik dengan perolehan skor 211,75 indikator disposisi kategori sangat baik dengan perolehan skor 245 indikator struktur birokrasi kategori sangat baik dengan perolehan skor 225,8 implementasi kebijakan program kampung Luku-luku rata-rata perolehan skor untuk ke empat indikator adalah 227,08 yang termasuk pada predikat sangat baik artinya bahwa implementasi kebijakan program kampung di kampung Luku-luku Distrik Wadangkku Kabupaten Jayawijaya selama Tahun 2017-2019 kategori sangat baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis menyarankan :

1. Komunikasi perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan informasi atau sosialisasi tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik terutama dalam hal pembuatan laporan.
2. Sumber daya masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal membuat laporan dan mengetik laporan dan memberi dorongan motivasi untuk membangun sumber daya manusia yang baik.
3. Disposisi perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana untuk pembangunan pasar tradisional agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalagunaan dana antara aparat kampung dan masyarakat.
4. Struktur birokrasi aparat kampung harus mengatur prosedur belanja barang dalam pembangunan penyalagunaan SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho;. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi angkutan publik. *studi kasus pada universitas*, 1(4), 628.
- Agustino. (2014). Penting komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana di kota makasar. *indikator komunikasi*, 2(3), 150.
- Chasanah, Khuswatun ; Rosyadi, Slamet ; Kurniasih, Denok ;. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *Implementasi kebijakan, dana desa, akses, penyimpangan, ketepatan layanan, akuntabilitas, program dan kebutuhan.*, 3(2), 12-32.
- Faisal , Muhammad ; Nain, Umar;. (2018). Implementasi Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Kohesi Sosial Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar. *Implikasi; pelaksanaan program; dana desa; kohesi sosial*, 20(3), 222 - 230.
- Florensi, Helen ;. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Policy, Village Fund Allocation, Villager Empowerment*, 1(1), 1-8.
- Hasman, Rasmah. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *Communication, Resource, Disposition, Bureaucracy Structure*, 3(11), 107-117.
- Mulyadi;. (2015). Perilaku organisasi dan kepemimpinan bandung : Alfbeta. 1(4), 29.
- Mustanir, Ahmad ; , Darmiah;. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Community Participation, Development, Policy Implementation*, 4(2), 266-238.
- Nurfaisal, Muhammad Dwi ; Mutiarin, Dyah ; , Sakir;. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten

unungkidul Tahun 2016. *akuntabilitas; pengelolaan dana desa; pembangunan infrastruktur*, 5(1), 58-70.

Sonda, Juliana ; Kiyai, Burhanuddin; Kolondam, Helly;. (2018). Implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Mina Hasa. *Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*.(ISSN : 2338-9613), 72-82.

Dokumen :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan (Kuisisioner)

JUDUL PENELITIAN :
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG DI
KAMPUNG LUKU-LUKU DISTRIK WADANGKU KABUPATEN
JAYAWIJAYA

I. Identitas Responden

1. No Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Agama :

II. Pengantar

Mohon kiranya Bapak/Ibu dapat membantu penulis memberikan keterangan atau data sesuai dengan kebenaran dan keyakinan dari Bapak dan Ibu data ini penulis perlukan untuk menyusun Skripsi sebagai syarat merai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Universitas Amal Ilmia (UNAIM) Yapis Wamena.

III. Petunjuk Pengisian :

Mohon Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda silang (X) huruf dari salah satu pilihan jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan pengalaman.

IV. Pernyataan

A. Indikator Komunikasi

I. Komunikasi

a. Transmisi

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang pembangunan perumahan kampung?

a. Sangat Mengetahui

b. Mengetahui

c. Kurang Mengetahui

d. Tidak Mengetahui

2. Apakah Bapak/Ibu ikut serta dalam pengalokasian dana kampung?

a. Sangat Mengikuti

b. Mengikuti

c. Kurang mengikuti

d. Tidak mengikuti

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang pengelolaan dana kampung?

a. Sangat mengetahui

b. Mengetahui

c. Kurang mengetahui

d. Tidak mengetahui

b. Kejelasan

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan pencerahan tentang pengelolaan dana kampung?

a. Sangat mengetahui

b. Mengetahui

- c. Kurang mengetahui
 - d. Tidak mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa banyak dana yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan?
- a. Sangat mengetahui
 - b. Mengetahui
 - c. Kurang mengetahui
 - d. Tidak mengetahui
3. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam muskam kampung?
- a. Sangat mengikuti
 - b. Mengikuti
 - c. Kurang mengikuti
 - d. Tidak mengikuti
- c. Konsisten
1. Apakah Bapak/Ibu konsisten dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kampung?
- a. Sangat konsisten
 - b. Konsisten
 - c. Kurang konsisten
 - d. Tidak konsisten
2. Apakah program pembangunan yang ada di kampung Luku-luku berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

3. Apakah dalam pengelolaan program kampung selaras dengan kesepakatan bersama?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

d. Partisipasi

1. Apakah Bapak/Ibu diikut sertakan dalam pengelolaan dana kampung tentang pembangunan perumahan?

- a. Sangat mengikuti
- b. Mengikuti
- c. Kurang mengikuti
- d. Tidak mengikuti

2. Apakah Bapak/Ibu berperan dalam pengalokasian dana di masing-masing program kampung yang ada?

- a. Sangat berperan
- b. Berperan
- c. Kurang berperan
- d. Tidak berperan

3. Apakah Bapak/Ibu bekerjasama antara aparat kampung dengan masyarakat tentang pembangunan kampung?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

B. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

1. Apakah Aparat kampung yang ada mampu untuk membuat laporan penggunaan dana kampung setiap tahun?
 - a. Sangat Mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang Mampu
 - d. Tidak Mampu
2. Apakah Aparat kampung Luku-luku mampu untuk menyampaikan penggunaan dana kampung disetiap program masing-masing?
 - a. Sangat mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang mampu
 - d. Tidak mampu
3. Apakah Aparat kampung Luku-luku mampu mendata masyarakat yang ada di kampung Luku-luku?
 - a. Sangat mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang mampu
 - d. Tidak mampu

b. Sumber Daya Finansial

1. Apakah Aparat kampung Luku-luku mengelolah keuangan yang ada dengan baik?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

2. Apakah Aparat kampung mengalokasi dana kampung sesuai dengan harapan masyarakat?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 3. Apakah Aparat kampung Luku-luku membuat arsip tentang keuangan setiap tahun?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
- c. Sumber Daya Sarana Prasarana
1. Apakah Bapak/Ibu mendata sarana prasarana yang ada dikampung Luku-luku?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 2. Apakah Bapak/Ibu mengelolah sarana prasarana yang ada di kampung Luku-luku?
 - a. Sangat baik
 - b. baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

3. Apakah Bapak/Ibu menjaga sarana prasarana yang ada di kampung Luku-luku?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

C. Disposisi

a. Komitmen

1. Apakah Bapak/Ibu sepakat untuk pembangunan pasar tradisional di kampung Luku-luku.

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

2. Apakah Bapak/Ibu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana untuk pembangunan pasar tradisional?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

3. Apakah dalam pembangunan pasar tradisional berjalan dengan baik?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

b. Kejujuran

1. Apakah Bapak/Ibu mengelolah dana kampung sesuai dengan kebutuhan program masing-masing?
 - a. Sanangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
2. Apakah masyarakat percaya kepada aparat kampung tentang pengelolaan dana disetiap program masing-masing?
 - a. Sanangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
3. Apakah aparat kampung dalam membuat laporan sesuai dengan penggunaan dana di setiap program masing-masing?
 - a. Sanangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

c. Sifat Demokratis

1. Apakah aparat kampung menerima masukan dari masyarakat tentang pembangunan kampung?
 - a. Sanangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

2. Apakah aparat kampung dengan masyarakat saling menerima pendapat demi kemajuan kampung?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
3. Apakah dalam pembangunan kampung ada perbedaan pendapat?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak ada

D. Struktur Birokrasi

- a. SOP
 1. Apakah ada rapat penyalagunaan RAPBK?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak perna
 2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan prosedur belanja barang dalam pengelolaan dana kampung?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

3. Apakah dalam pembangunan pasar tradisional menyalagunakan SOP?
 - a. Sanagat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak ada
- b. Fragmentasi
 1. Apakah ada upaya dalam penyalagunaan dana kampung?
 - a. Sanagat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak ada
 2. Apakah ada upaya dalam perbedaan pendapat antara masyarakat dan aparat kampung?
 - a. Sanagat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baikb
 - d. Tidak ada
 3. Apakah ada upaya dalam pembangunan program masing-masing agar berjalan dengan baik?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

Lampiran 2 : Data Hasil Kuisisioner

No Responden	Indikator komunikasi											
	Transmisi											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓	✓			✓				✓			
2		✓				✓			✓			
3			✓				✓		✓			
4				✓	✓				✓			
5			✓			✓				✓		
6		✓					✓			✓		
7	✓					✓					✓	
8		✓					✓			✓		
9			✓		✓						✓	
10	✓						✓			✓		
11		✓				✓					✓	
12			✓		✓							✓
13	✓					✓			✓			
14				✓			✓			✓		
15		✓				✓					✓	
16	✓							✓			✓	
17			✓		✓					✓		
18		✓			✓					✓		
19	✓					✓					✓	
20		✓				✓					✓	
21	✓						✓					
22		✓					✓			✓		
23		✓				✓					✓	
24	✓					✓				✓		
25		✓					✓		✓			
26		✓				✓				✓		

27	✓						✓				✓	
28	✓						✓				✓	
29		✓						✓			✓	
30			✓		✓					✓		
31	✓				✓					✓		
32	✓						✓		✓			
33		✓					✓			✓		
34			✓				✓				✓	
35				✓	✓					✓		
36	✓						✓				✓	
37	✓							✓				✓
38			✓				✓				✓	
39	✓							✓		✓		
40		✓			✓					✓		
41			✓		✓						✓	
42		✓						✓		✓		
43		✓						✓		✓		
44			✓						✓		✓	
45		✓						✓		✓		
46			✓						✓	✓		
47								✓		✓		
48	✓			✓					✓			✓
49	✓							✓				✓
50			✓		✓					✓		
51	✓				✓						✓	
52		✓					✓				✓	
53	✓				✓							✓
54		✓					✓				✓	
55		✓			✓							✓
56			✓				✓			✓		
57				✓				✓		✓		

58	✓				✓					✓		
59		✓			✓				✓			
60			✓		✓					✓		
61			✓			✓					✓	
62	✓						✓			✓		
63	✓					✓			✓			
64			✓		✓				✓			
65	✓				✓					✓		
66		✓				✓				✓		
67			✓			✓			✓			
68		✓					✓		✓			
69	✓					✓				✓		
70			✓		✓					✓		
71		✓			✓				✓			
72	✓					✓			✓			
73		✓			✓				✓			
Jumlah	36	20	13	4	27	26	17	3	27	36	13	4

No Responden	Indikator komunikasi											
	Kejelasan											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓	✓			✓				✓			
2		✓				✓			✓			
3			✓				✓		✓			
4				✓	✓				✓			
5			✓			✓				✓		
6		✓					✓			✓		
7	✓					✓					✓	
8		✓					✓			✓		
9			✓		✓						✓	
10	✓						✓			✓		
11		✓				✓					✓	
12			✓		✓							✓
13	✓					✓			✓			
14				✓			✓			✓		
15		✓				✓					✓	
16	✓							✓			✓	
17			✓		✓					✓		
18		✓			✓					✓		
19	✓					✓					✓	
20		✓				✓					✓	
21	✓						✓					
22		✓					✓			✓		
23		✓				✓					✓	
24	✓					✓				✓		
25		✓					✓		✓			
26		✓				✓				✓		
27		✓					✓				✓	
28	✓					✓					✓	
29		✓						✓			✓	

30			✓		✓					✓		
31	✓				✓					✓		
32	✓					✓			✓			
33		✓				✓				✓		
34			✓			✓					✓	
35				✓	✓					✓		
36	✓					✓					✓	
37	✓						✓					✓
38			✓			✓					✓	
39	✓						✓			✓		
40		✓			✓					✓		
41			✓		✓						✓	
42		✓					✓		✓			
43		✓					✓		✓			
44			✓					✓		✓		
45		✓					✓			✓		
46			✓					✓	✓			
47							✓		✓			
48	✓			✓				✓			✓	
49	✓						✓				✓	
50			✓		✓				✓			
51	✓				✓					✓		
52		✓				✓				✓		
53	✓				✓							✓
54		✓				✓				✓		
55		✓			✓						✓	
56			✓			✓			✓			
57				✓			✓		✓			
58	✓				✓					✓		
59		✓			✓				✓			
60			✓		✓					✓		
61			✓			✓					✓	

62	✓						✓			✓		
63	✓					✓			✓			
64			✓		✓				✓			
65	✓				✓					✓		
66		✓				✓				✓		
67			✓			✓			✓			
68		✓					✓		✓			
69	✓					✓				✓		
70			✓		✓					✓		
71		✓			✓				✓			
72	✓					✓			✓			
73		✓			✓				✓			
Jumlah	36	13	20	4	27	20	13	4	20	36	13	4

No Responden	Indikator komunikasi											
	Konsisten											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓	✓			✓				✓			
2		✓				✓			✓			
3			✓				✓		✓			
4				✓	✓				✓			
5			✓			✓				✓		
6		✓					✓			✓		
7	✓					✓					✓	
8		✓					✓			✓		
9			✓		✓						✓	
10	✓						✓			✓		
11		✓				✓					✓	
12			✓		✓							✓
13	✓					✓			✓			
14				✓			✓			✓		
15		✓				✓					✓	
16	✓							✓			✓	
17			✓		✓					✓		
18		✓			✓					✓		
19	✓					✓					✓	
20		✓				✓					✓	
21	✓						✓					
22		✓					✓			✓		
23		✓				✓					✓	
24	✓					✓				✓		
25		✓					✓		✓			
26		✓				✓				✓		
27		✓					✓				✓	
28	✓					✓					✓	
29		✓						✓			✓	
30			✓		✓					✓		
31	✓				✓					✓		
32	✓					✓			✓			

33		✓				✓				✓		
34			✓			✓					✓	
35				✓	✓					✓		
36	✓					✓					✓	
37	✓						✓					✓
38			✓			✓					✓	
39	✓						✓			✓		
40		✓			✓					✓		
41			✓		✓						✓	
42		✓					✓		✓			
43		✓					✓		✓			
44			✓					✓		✓		
45		✓					✓			✓		
46			✓					✓	✓			
47							✓		✓			
48	✓			✓				✓			✓	
49	✓						✓				✓	
50			✓		✓				✓			
51	✓				✓					✓		
52		✓				✓				✓		
53	✓				✓							✓
54		✓				✓				✓		
55		✓			✓						✓	
56			✓			✓			✓			
57				✓			✓		✓			
58	✓				✓					✓		
59		✓			✓				✓			
60			✓		✓					✓		
61			✓			✓					✓	
62	✓						✓			✓		
63	✓					✓			✓			
64			✓		✓				✓			
65	✓				✓					✓		
66		✓				✓				✓		
67			✓			✓			✓			
68		✓					✓		✓			

69	✓					✓				✓		
70			✓		✓					✓		
71		✓			✓				✓			
72	✓					✓			✓			
73		✓			✓				✓			
Jumlah	27	20	13	4	36	20	13	4	27	26	17	4

No Responden	Indikator komunikasi											
	Partisipasi											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓				✓				✓			
2		✓				✓			✓			
3			✓				✓		✓			
4				✓	✓				✓			
5			✓			✓				✓		
6		✓					✓			✓		
7	✓					✓					✓	
8		✓					✓			✓		
9			✓		✓						✓	
10	✓						✓			✓		
11		✓				✓					✓	
12			✓		✓							✓
13	✓					✓			✓			
14				✓			✓			✓		
15		✓				✓					✓	
16	✓							✓			✓	
17			✓		✓					✓		
18		✓			✓					✓		
19	✓					✓					✓	
20		✓				✓					✓	
21	✓						✓					
22		✓					✓			✓		
23		✓				✓					✓	
24	✓					✓				✓		
25		✓					✓		✓			
26		✓				✓				✓		

27	✓						✓				✓	
28	✓						✓				✓	
29		✓						✓			✓	
30			✓			✓				✓		
31	✓					✓				✓		
32	✓						✓			✓		
33		✓					✓			✓		
34			✓				✓				✓	
35				✓		✓				✓		
36	✓						✓				✓	
37	✓							✓				✓
38			✓				✓				✓	
39	✓							✓		✓		
40		✓				✓				✓		
41			✓			✓					✓	
42		✓						✓		✓		
43		✓						✓		✓		
44			✓						✓	✓		
45		✓						✓		✓		
46			✓						✓	✓		
47								✓		✓		
48	✓			✓					✓		✓	
49	✓							✓			✓	
50			✓			✓				✓		
51	✓					✓				✓		
52		✓					✓			✓		
53	✓					✓						✓
54		✓					✓			✓		
55		✓				✓					✓	
56			✓				✓			✓		
57				✓				✓		✓		
58	✓					✓				✓		
59		✓				✓				✓		
60			✓			✓				✓		
61			✓				✓				✓	
62	✓							✓		✓		

63	✓					✓			✓			
64			✓		✓				✓			
65	✓				✓					✓		
66		✓				✓				✓		
67			✓			✓			✓			
68		✓					✓		✓			
69	✓					✓				✓		
70			✓		✓					✓		
71		✓			✓				✓			
72	✓					✓			✓			
73		✓			✓				✓			
Jumlah	26	17	4	15	36	20	13	4	27	26	17	4

No Responden	Indikator Sumber Daya											
	Sumber daya manusia											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓	✓			✓				✓			
2		✓				✓			✓			
3			✓				✓		✓			
4				✓	✓				✓			
5			✓			✓				✓		
6		✓					✓			✓		
7	✓					✓					✓	
8		✓					✓			✓		
9			✓		✓						✓	
10	✓						✓			✓		
11		✓				✓					✓	
12			✓		✓							✓
13	✓					✓			✓			
14				✓			✓			✓		
15		✓				✓					✓	
16	✓							✓			✓	
17			✓		✓					✓		
18		✓			✓					✓		
19	✓					✓					✓	
20		✓				✓					✓	

21	✓						✓					
22		✓					✓			✓		
23		✓					✓				✓	
24	✓						✓			✓		
25		✓					✓		✓			
26		✓					✓			✓		
27	✓						✓				✓	
28	✓						✓				✓	
29		✓						✓			✓	
30			✓		✓					✓		
31	✓				✓					✓		
32	✓						✓		✓			
33		✓					✓			✓		
34			✓				✓				✓	
35				✓	✓					✓		
36	✓						✓				✓	
37	✓							✓				✓
38			✓				✓				✓	
39	✓							✓		✓		
40		✓			✓					✓		
41			✓		✓						✓	
42		✓						✓	✓			
43		✓						✓	✓			
44			✓						✓	✓		
45		✓						✓		✓		
46			✓						✓	✓		
47								✓	✓			
48	✓			✓					✓		✓	
49	✓							✓			✓	
50			✓		✓				✓			
51	✓				✓					✓		
52		✓					✓			✓		
53	✓				✓							✓
54		✓					✓			✓		
55		✓			✓						✓	
56			✓				✓		✓			

57				✓			✓		✓			
58	✓				✓					✓		
59		✓			✓				✓			
60			✓		✓					✓		
61			✓			✓					✓	
62	✓						✓			✓		
63	✓					✓			✓			
64			✓		✓				✓			
65	✓				✓					✓		
66		✓				✓				✓		
67			✓			✓			✓			
68		✓					✓		✓			
69	✓					✓				✓		
70			✓		✓					✓		
71		✓			✓				✓			
72	✓					✓			✓			
73		✓			✓				✓			
Jumlah	27	36	13	4	36	20	13	4	36	20	4	13

No Responden	Indikator Sumber Daya											
	Sumber daya finansial											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓				✓				✓			
2	✓				✓				✓			
3	✓				✓				✓			
4	✓				✓				✓			
5	✓				✓				✓			
6		✓			✓					✓		
7		✓			✓					✓		
8		✓			✓					✓		
9		✓				✓				✓		
10		✓				✓				✓		
11		✓				✓					✓	
12		✓				✓					✓	
13		✓				✓					✓	
14		✓				✓					✓	

15			✓			✓					✓	
16			✓			✓					✓	
17			✓			✓					✓	
18			✓			✓					✓	
19			✓			✓				✓		
20		✓					✓			✓		
21		✓					✓			✓		
22			✓				✓			✓		
23			✓				✓			✓		
24		✓					✓		✓			
25		✓					✓		✓			
26			✓					✓	✓			
27			✓					✓	✓			
28		✓						✓	✓			
29		✓						✓		✓		
30			✓					✓		✓		
31			✓					✓		✓		
32		✓						✓		✓		
33		✓						✓	✓			
34			✓					✓	✓			
35			✓				✓		✓			
36		✓					✓			✓		
37		✓				✓				✓		
38			✓			✓				✓		
39			✓				✓			✓		
40		✓			✓				✓			
41			✓		✓				✓			
42		✓			✓				✓			
43			✓					✓	✓			
44		✓						✓	✓			
45			✓					✓	✓			
46			✓					✓		✓		
47			✓			✓				✓		
48		✓						✓		✓		
49		✓					✓			✓		
50		✓					✓			✓		

51			✓		✓				✓			
52			✓		✓				✓			
53			✓			✓			✓			
54		✓				✓			✓			
55		✓						✓	✓			
56		✓						✓	✓			
57		✓				✓			✓			
58		✓					✓		✓			
59			✓				✓		✓			
60			✓				✓		✓			
61			✓		✓				✓			
62		✓			✓				✓			
63		✓				✓			✓			
64		✓				✓			✓			
65		✓					✓		✓			
66			✓					✓	✓			
67			✓					✓	✓			
68			✓					✓	✓			
69		✓				✓			✓			
70		✓				✓			✓			
71		✓					✓		✓			
72			✓			✓			✓			
73			✓		✓				✓			
Jumlah	27	20	17	4	27	36	13	4	36	20	13	4

No Responden	Indikator Sumber Daya											
	Sumber daya sarana prasarana											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓				✓				✓			
2	✓				✓				✓			
3	✓				✓				✓			
4	✓				✓				✓			
5	✓				✓				✓			
6		✓			✓					✓		
7		✓			✓					✓		
8		✓			✓					✓		

9		✓				✓				✓		
10		✓				✓				✓		
11		✓				✓					✓	
12		✓				✓					✓	
13		✓				✓					✓	
14		✓				✓					✓	
15			✓			✓					✓	
16			✓			✓					✓	
17			✓			✓					✓	
18			✓			✓					✓	
19			✓			✓				✓		
20		✓					✓			✓		
21		✓					✓			✓		
22			✓				✓			✓		
23			✓				✓			✓		
24		✓					✓		✓			
25		✓					✓		✓			
26			✓					✓	✓			
27			✓					✓	✓			
28		✓						✓	✓			
29		✓						✓		✓		
30			✓					✓		✓		
31			✓					✓		✓		
32		✓						✓		✓		
33		✓						✓	✓			
34			✓					✓	✓			
35			✓				✓		✓			
36		✓					✓			✓		
37		✓				✓				✓		
38			✓			✓				✓		
39			✓				✓			✓		
40		✓			✓				✓			
41			✓		✓				✓			
42		✓			✓				✓			
43			✓					✓	✓			
44		✓						✓	✓			

45			✓					✓	✓			
46			✓					✓		✓		
47			✓			✓				✓		
48		✓						✓		✓		
49		✓					✓			✓		
50		✓					✓			✓		
51			✓		✓				✓			
52			✓		✓				✓			
53			✓			✓			✓			
54		✓				✓			✓			
55		✓						✓	✓			
56		✓						✓	✓			
57		✓				✓			✓			
58		✓					✓		✓			
59			✓				✓		✓			
60			✓				✓		✓			
61			✓		✓				✓			
62		✓			✓				✓			
63		✓				✓			✓			
64		✓				✓			✓			
65		✓					✓		✓			
66			✓					✓	✓			
67			✓					✓	✓			
68			✓					✓	✓			
69		✓				✓			✓			
70		✓				✓			✓			
71		✓					✓		✓			
72			✓			✓			✓			
73			✓		✓				✓			
Jumlah	4	27	26	17	4	36	13	20	14	27	20	4

No Responden	Indikator Disposisi											
	Komitmen											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓				✓				✓			
2	✓				✓				✓			

3	✓				✓				✓			
4	✓				✓				✓			
5	✓				✓				✓			
6		✓			✓					✓		
7		✓			✓					✓		
8		✓			✓					✓		
9		✓				✓				✓		
10		✓				✓				✓		
11		✓				✓					✓	
12		✓				✓					✓	
13		✓				✓					✓	
14		✓				✓					✓	
15			✓			✓					✓	
16			✓			✓					✓	
17			✓			✓					✓	
18			✓			✓					✓	
19			✓			✓				✓		
20		✓					✓			✓		
21		✓					✓			✓		
22			✓				✓			✓		
23			✓				✓			✓		
24		✓					✓		✓			
25		✓					✓		✓			
26			✓					✓	✓			
27			✓					✓	✓			
28		✓						✓	✓			
29		✓						✓		✓		
30			✓					✓		✓		
31			✓					✓		✓		
32		✓						✓		✓		
33		✓						✓	✓			
34			✓					✓	✓			
35			✓				✓		✓			
36		✓					✓			✓		
37		✓				✓				✓		
38			✓			✓				✓		

39			✓				✓			✓		
40		✓			✓				✓			
41			✓		✓				✓			
42		✓			✓				✓			
43			✓					✓	✓			
44		✓						✓	✓			
45			✓					✓	✓			
46			✓					✓		✓		
47			✓			✓				✓		
48		✓						✓		✓		
49		✓					✓			✓		
50		✓					✓			✓		
51			✓		✓					✓		
52			✓		✓					✓		
53			✓			✓				✓		
54		✓				✓				✓		
55		✓						✓	✓			
56		✓						✓	✓			
57		✓				✓				✓		
58		✓					✓			✓		
59			✓				✓			✓		
60			✓				✓			✓		
61			✓		✓					✓		
62		✓			✓					✓		
63		✓				✓				✓		
64		✓				✓				✓		
65		✓					✓			✓		
66			✓					✓	✓			
67			✓					✓	✓			
68			✓					✓	✓			
69		✓				✓				✓		
70		✓				✓				✓		
71		✓					✓			✓		
72			✓			✓				✓		
73			✓		✓					✓		
Jumlah	27	20	17	4	27	36	13	4	36	20	13	4

No Responden	Indikator Disposisi											
	Kejujuran											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	✓				✓				✓			
2	✓				✓				✓			
3	✓				✓				✓			
4	✓				✓				✓			
5	✓				✓				✓			
6		✓			✓					✓		
7		✓			✓					✓		
8		✓			✓					✓		
9		✓				✓				✓		
10		✓				✓				✓		
11		✓				✓					✓	
12		✓				✓					✓	
13		✓				✓					✓	
14		✓				✓					✓	
15			✓			✓					✓	
16			✓			✓					✓	
17			✓			✓					✓	
18			✓			✓					✓	
19			✓			✓				✓		
20		✓					✓			✓		
21		✓					✓			✓		
22			✓				✓			✓		
23			✓				✓			✓		
24		✓					✓		✓			
25		✓					✓		✓			
26			✓					✓	✓			
27			✓					✓	✓			
28		✓						✓	✓			
29		✓						✓		✓		
30			✓					✓		✓		
31			✓					✓		✓		
32		✓						✓		✓		

33		✓						✓	✓			
34			✓					✓	✓			
35			✓				✓		✓			
36		✓					✓			✓		
37		✓				✓				✓		
38			✓			✓				✓		
39			✓				✓			✓		
40		✓			✓				✓			
41			✓		✓				✓			
42		✓			✓				✓			
43			✓					✓	✓			
44		✓						✓	✓			
45			✓					✓	✓			
46			✓					✓		✓		
47			✓			✓				✓		
48		✓						✓		✓		
49		✓					✓			✓		
50		✓					✓			✓		
51			✓		✓				✓			
52			✓		✓				✓			
53			✓			✓			✓			
54		✓				✓			✓			
55		✓						✓	✓			
56		✓						✓	✓			
57		✓				✓			✓			
58		✓					✓		✓			
59			✓				✓		✓			
60			✓				✓		✓			
61			✓		✓				✓			
62		✓			✓				✓			
63		✓				✓			✓			
64		✓				✓			✓			
65		✓					✓		✓			
66			✓					✓	✓			
67			✓					✓	✓			
68			✓					✓	✓			

69		✓				✓			✓			
70		✓				✓			✓			
71		✓					✓		✓			
72			✓			✓			✓			
73			✓		✓				✓			
Jumlah	27	20	17	4	27	36	13	4	36	20	13	4

No Responden	Indikator Disposisi											
	Sifat Demokratis											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	C	D
1	✓				✓				✓			
2	✓				✓				✓			
3	✓				✓				✓			
4	✓				✓				✓			
5	✓				✓				✓			
6		✓			✓					✓		
7		✓			✓					✓		
8		✓			✓					✓		
9		✓				✓				✓		
10		✓				✓				✓		
11		✓				✓					✓	
12		✓				✓					✓	
13		✓				✓					✓	
14		✓				✓					✓	
15			✓			✓					✓	
16			✓			✓					✓	
17			✓			✓					✓	
18			✓			✓					✓	
19			✓			✓				✓		
20		✓					✓			✓		
21		✓					✓			✓		
22			✓				✓			✓		
23			✓				✓			✓		
24		✓					✓		✓			
25		✓					✓		✓			
26			✓					✓	✓			

27			✓					✓	✓			
28		✓						✓	✓			
29		✓						✓		✓		
30			✓					✓		✓		
31			✓					✓		✓		
32		✓						✓		✓		
33		✓						✓	✓			
34			✓					✓	✓			
35			✓				✓		✓			
36		✓					✓			✓		
37		✓				✓				✓		
38			✓			✓				✓		
39			✓				✓			✓		
40		✓			✓				✓			
41			✓		✓				✓			
42		✓			✓				✓			
43			✓					✓	✓			
44		✓						✓	✓			
45			✓					✓	✓			
46			✓					✓		✓		
47			✓			✓				✓		
48		✓						✓		✓		
49		✓					✓			✓		
50		✓					✓			✓		
51			✓		✓				✓			
52			✓		✓				✓			
53			✓			✓			✓			
54		✓				✓			✓			
55		✓						✓	✓			
56		✓						✓	✓			
57		✓				✓			✓			
58		✓					✓		✓			
59			✓				✓		✓			
60			✓				✓		✓			
61			✓		✓				✓			
62		✓			✓				✓			

63		✓				✓			✓			
64		✓				✓			✓			
65		✓					✓		✓			
66			✓					✓	✓			
67			✓					✓	✓			
68			✓					✓	✓			
69		✓				✓			✓			
70		✓				✓			✓			
71		✓					✓		✓			
72			✓			✓			✓			
73			✓		✓				✓			
Jumlah	36	13	20	4	36	20	13	4	27	26	13	4

No Responden	Indikator Struktur Birokrasi											
	SOP											
	1				2				3			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	C	D
1	✓	✓			✓				✓			
2	✓				✓				✓			
3			✓		✓				✓			
4			✓		✓				✓			
5	✓					✓				✓		
6	✓					✓				✓		
7	✓					✓					✓	
8	✓						✓			✓		
9			✓				✓				✓	
10	✓						✓			✓		
11						✓					✓	
12	✓				✓							✓
13	✓					✓			✓			
14				✓			✓			✓		
15				✓		✓					✓	
16	✓				✓						✓	
17			✓		✓						✓	
18		✓			✓						✓	
19	✓					✓					✓	
20	✓					✓					✓	

21	✓						✓			✓		
22		✓					✓			✓		
23		✓				✓				✓		
24	✓					✓				✓		
25		✓					✓			✓		
26		✓				✓				✓		
27	✓						✓				✓	
28	✓					✓					✓	
29	✓							✓			✓	
30	✓				✓					✓		
31	✓				✓					✓		
32	✓					✓				✓		
33		✓				✓				✓		
34			✓			✓					✓	
35				✓	✓						✓	
36	✓					✓					✓	
37	✓						✓					✓
38	✓					✓					✓	
39	✓						✓				✓	
40		✓			✓						✓	
41		✓			✓						✓	
42		✓					✓		✓			
43		✓					✓		✓			
44			✓					✓	✓			
45			✓				✓		✓			
46			✓					✓	✓			
47			✓				✓		✓			
48	✓							✓	✓			
49	✓						✓		✓			
50	✓				✓				✓			
51	✓				✓					✓		
52	✓				✓					✓		
53	✓				✓					✓		
54		✓				✓				✓		
55		✓			✓					✓		
56			✓			✓			✓			

57				✓			✓		✓			
58	✓				✓				✓			
59		✓			✓				✓			
60			✓		✓					✓		
61			✓			✓				✓		
62	✓					✓				✓		
63	✓					✓			✓			
64	✓				✓				✓			
65	✓				✓				✓			
66		✓			✓				✓			
67		✓			✓				✓			
68		✓					✓		✓			
69	✓					✓				✓		
70			✓		✓					✓		
71		✓			✓				✓			
72	✓					✓			✓			
73		✓			✓				✓			
Jumlah	36	20	13	4	36	20	13	4	27	36	13	4

No Responden	Indikator Struktur Birokrais							
	Fragmentasi							
	1				2			
	a	b	c	d	a	b	c	d
1	✓				✓			
2	✓				✓			
3	✓				✓			
4	✓				✓			
5	✓				✓			
6	✓				✓			
7	✓				✓			
8	✓				✓			
9	✓				✓			

10	✓				✓			
11	✓					✓		
12	✓					✓		
13		✓				✓		
14		✓				✓		
15		✓				✓		
16		✓				✓		
17		✓				✓		
18		✓				✓		
19		✓				✓		
20		✓				✓		
21		✓			✓			
22		✓			✓			
23			✓		✓			
24			✓		✓			
25			✓		✓			
26			✓		✓			
27			✓		✓			
28			✓		✓			
29			✓		✓			
30		✓			✓			
31		✓						✓
32		✓						✓
33		✓						✓
34		✓						✓
35		✓						✓
36		✓					✓	
37		✓				✓		
38		✓			✓			
39		✓			✓			
40		✓			✓			
41		✓			✓			
42			✓		✓			
43			✓		✓			
44			✓		✓			
45			✓		✓			

46			✓		✓			
47		✓			✓			
48		✓				✓		
49		✓				✓		
50		✓				✓		
51			✓			✓		
52			✓			✓		
53			✓				✓	
54			✓				✓	
55			✓				✓	
56	✓						✓	
57	✓						✓	
58	✓						✓	
59	✓						✓	
60	✓						✓	
61			✓				✓	
62			✓				✓	
63			✓			✓		
64		✓				✓		
65		✓			✓			
66		✓			✓			
67		✓			✓			
68		✓			✓			
69		✓			✓			
70		✓			✓			
71		✓			✓			
72		✓			✓			
73	✓				✓			
Jumlah	36	20	13	4	27	26	17	4

Lampiran 3 : Data Identitas Responden

Nomor Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Agama
1	L	SMP	PETANI	KATOLIK
2	L	SD	PETANI	PROTESTAN
3	L	SD	PETANI	PROTESTAN
4	L	SD	PETANI	KATOLIK
5	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
6	L	SD	PETANI	PROTESTAN
7	L	SD	PETANI	KATOLIK
8	L	SD	PETANI	PROTESTAN
9	L	SMP	PETANI	KATOLIK
10	L	SMP	PETANI	KATOLIK
11	L	SD	PETANI	KATOLIK
12	L	SD	PETANI	PROTESTAN
13	L	SD	PETANI	KATOLIK
14	L	SD	PETANI	PROTESTAN
15	L	SD	PETANI	KATOLIK
16	L	SD	PETANI	PROTESTAN
17	L	SMP	PETANI	KATOLIK
18	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
19	L	SMP	PETANI	KATOLIK
20	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
21	L	SMP	PETANI	KATOLIK
22	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
23	L	SMP	PETANI	KATOLIK
24	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
25	L	SMP	PETANI	KATOLIK

26	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
27	L	SMP	PETANI	KATOLIK
28	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
29	L	SMP	TUKANG	KATOLIK
30	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
31	L	SMP	PETANI	KATOLIK
32	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
33	L	SMP	PETANI	KATOLIK
34	L	SMP	PETANI	KATOLIK
35	L	SMP	PNS	KATOLIK
36	L	SMP	PETANI	KATOLIK
37	L	SMP	PETANI	KATOLIK
38	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
39	L	SMP	PETANI	KATOLIK
40	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
41	L	SMP	PETANI	KATOLIK
42	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
43	L	SMP	PNS	KATOLIK
44	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
45	L	SMP	PETANI	KATOLIK
46	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
47	L	SMP	TUKANG	KATOLIK
48	L	SD	PETANI	PROTESTAN
49	L	SD	PETANI	KATOLIK
50	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
51	L	SMP	PETANI	KATOLIK
52	L	SMP	PETANI	PROTESTAN
53	L	SD	PNS	KATOLIK
54	L	SD	PETANI	PROTESTAN

55	L	SD	PETANI	KATOLIK
56	P	SD	PETANI	PROTESTAN
57	P	SD	PNS	KATOLIK
58	L	SD	TUKANG	PROTESTAN
59	P	SD	PETANI	KATOLIK
60	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
61	P	SMP	PETANI	KATOLIK
62	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
63	P	SD	PETANI	KATOLIK
64	P	SD	PETANI	PROTESTAN
65	P	SMP	PETANI	KATOLIK
66	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
67	P	SD	PETANI	KATOLIK
68	P	SMP	PETANI	PROTESTAN
69	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
70	L	SMP	TUKANG	PROTESTAN
71	P	SMP	PETANI	KATOLIK
72	P	SD	PETANI	PROTESTAN
73	L	SD	TUKANG	KATOLIK



Foto : Bersama Kepala Kampung Luku-Luku



Foto : Saat Pembagian Kuisioner



Foto : Saat Pembagian Kuisioner



Foto : Saat Pembagian Kuisioner



Foto : Saat Pembagian Kuisioner



Foto : Saat Pembagian Kuisioner



Foto : Saat Pembagian Kuisioner



Foto : Saat Pembagian Kuisioner

Foto : Saat Pembagian Kuisioner



Foto : Saat Pembagian Kuisiner



Foto : Saat Pembagian Kuisiner

BIODATA



NANI MABEL, NIM. 201710068. Lahir di Yiwika pada tanggal 01 Mei 1999 merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang beragama Kristen Katolik Ayah bernama Karlos Mabel dan Ibu bernama Heriana Daby yang beralamat di Yiwika orang tua beragama Kristen Katolik pekerjaan ayah adalah petani dan ibu sebagai ibu rumah tangga.

Pendidikan Formil penulis : Menyelesaikan pendidikan dasar di SD YPPK Santo Matheus Yiwika pada Tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Kurulu dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri Kurulu dan lulus pada tahun 2017 kemudian pada Tahun 2017 melanjutkan perguruan tinggi penulis mendaftar di STISIP Amal Ilmia Yapis Wamena dan di terima sebagai mahasiswa pada program studi Ilmu Pemerintahan dengan status mahasiswa murni. Pada tahun 2020 berupa lembaga menjadi UNAIM.